LAPORAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN INFORMASI DINAS PKP DAN OPERASIONAL PPID

TAHUN 2020

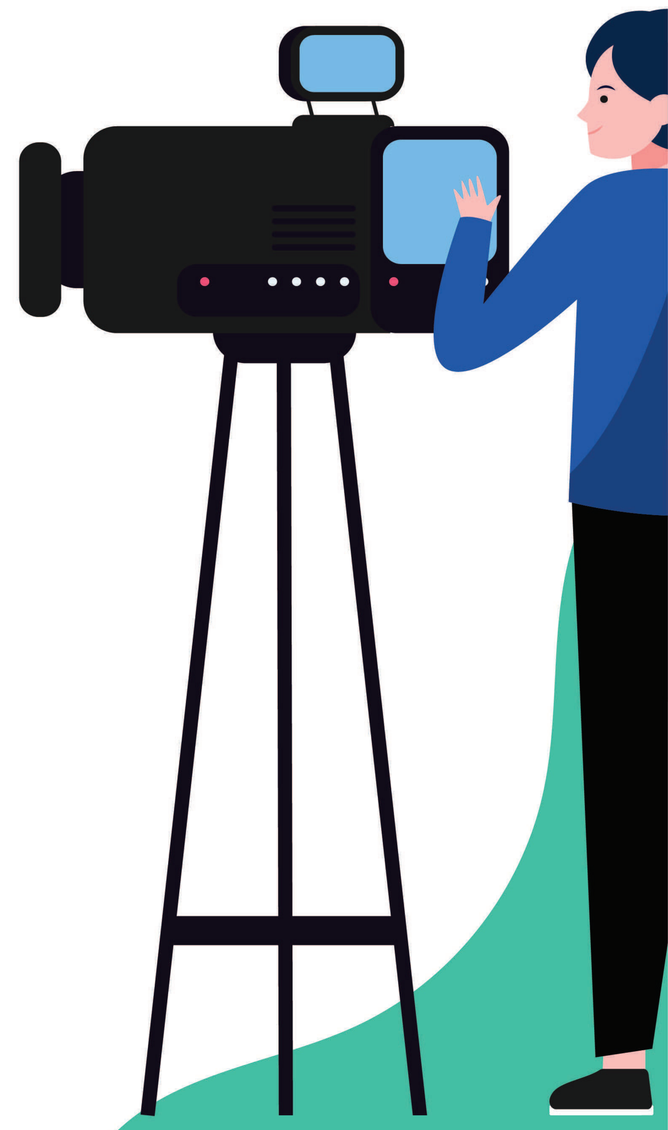

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Adapun laporan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Bab 1 adalah Pendahuluan, Bab 2 Referensi Hukum, Bab 3 membahas Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Bab 5 membahas Kesimpulan Dan Saran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP Dan Operasional PPID Tahun 2020 ini .

Medan, Januari 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi ii

Bab 1 Pendahuluan..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Maksud Dan Tujuan..... 1
1.3 Sasaran..... 1
1.4 Keluaran..... 2
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan..... 2
1.6 Tenaga Pendukung..... 2
1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan..... 3
1.8 Sistematika Pembahasan……..... 3

Bab 2 Referensi Hukum..... 5

Bab 3 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik. . 5

3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik..... 5
3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik..... 12
3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya..... 12
3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019..... 13
3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2019..... 15

Bab 4 Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik..... 16

Bab 5 Kesimpulan Dan Saran..... 17

Bab 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. Tanpa informasi, suatu perusahaan atau instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dan terintergrasi agar dapat mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan – badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Pada konteks inilah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan beserta hasil dan manfaatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

I.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang akurat terkait dengan semua aktifitas dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

I.4 Keluaran

Pada kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan adalah disajikannya informasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk berita dan di tampilkan ke dalam web site yang telah tersedia sehingga bisa di akses oleh masyarakat dengan seluas-luasnya.

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain :

A. Melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
B. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data.
C. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi.
D. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
E. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

1.6 Tenaga Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga pendukung. Tenaga pendukung yang dimaksud bertugas mengembangkan website, menginput seluruh bahan serta data terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, menyusun narasi berita dan menyusun laporan bulanan yang berisikan tentang penugasan yang telah dilaksanakan. Tenaga pendukung disyaratkan memiliki kualifikasi teknis sebagai berikut :

1. Tenaga Pendukung Pengembangan Website
   a) Pendidikan Sarjana S-1 Teknologi Informatika/Teknologi Informasi/Sistem Informasi;
   b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
   c) Mampu merekam, mengedit, dan mengembangkan website pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta menginput berita kegiatan Dinas pada website;
   d) Menguasai manage servis server berikut software pendukungnya;

2. Tenaga Pendukung Penulis
   a) Pendidikan Sarjana S-1 Komunikasi;
   b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office;
   c) Mampu menyusun informasi sebagai bahan berita atas pelaksanaan seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

Adapun jangka waktu pekerjaan tenaga pendukung yang dimaksud selama 10 (sepuluh) bulan.

1.7 Jangka Waktu Pekerjaan

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan.

1.8 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pemabahasan pada kegiatan ini meliputi :

Bab 1 : Pada bab ini menguraikan antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, keluaran, ruang lingkup kegiatan, tenaga pendukung, jangka waktu pelaksanaan dan sistematika pembahasan.

Bab 2 : Bab ini berisikan referensi hukum yang terkait dala pelaksanaan kegiatan.

Bab 3 : Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Bab 4 : Pada bab ini menbahas Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .

Bab 5 : Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan Dan Saran.

Bab 2
Referensi Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera UtaraTahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bab 3
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

3.1 Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dalam rangka operasionalisasi PPID pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media, namun sebagai berikut :

A. Melalui website http://dispkp.sumutprov.go.id

Website Dan Aplikasi PPID

Daftar Informasi Publik Di Aplikasi PPID

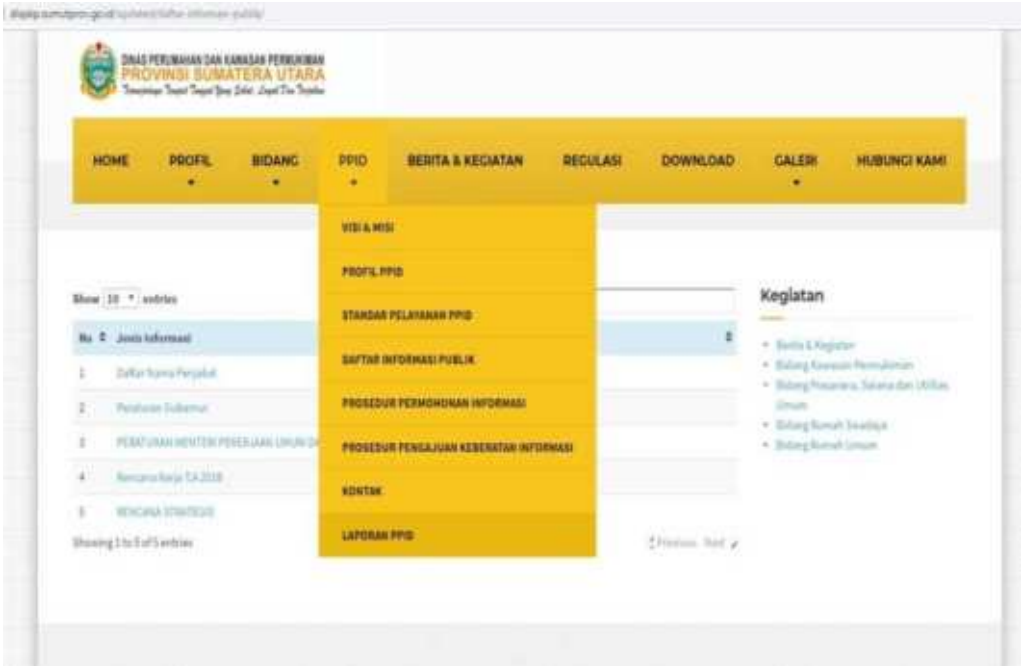

Prosedur Permohonan Informasi

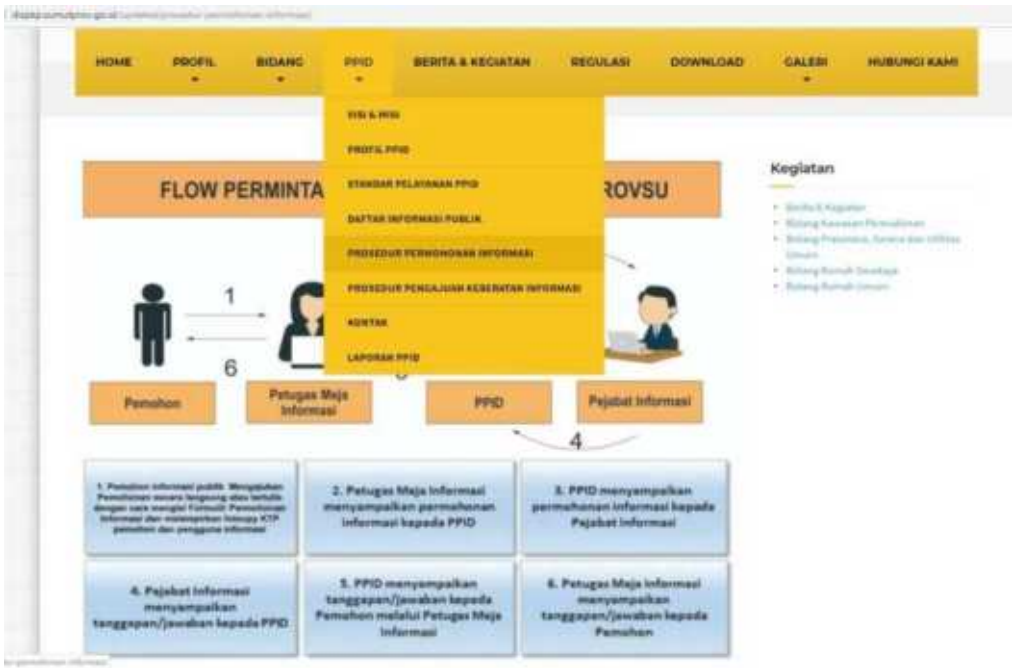

Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

Laporan PPID

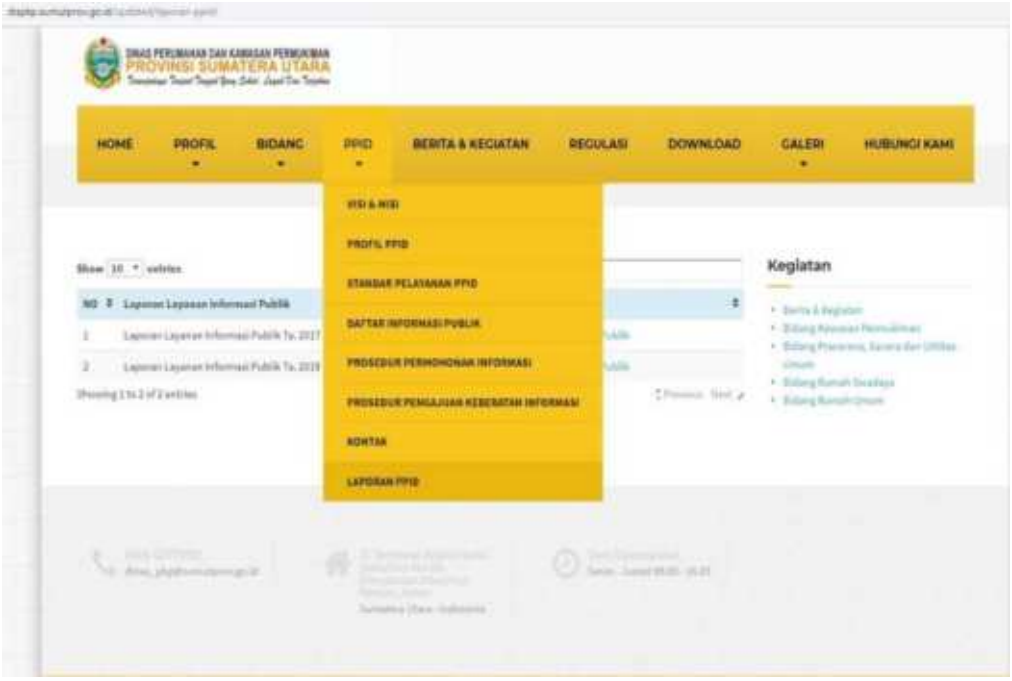

B. Pelayanan Informasi

Mencuci Tangan

Setiap orang yang berkunjung ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu, diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan protocol kesehatan dan memakai masker serta pengecekkan suhu badan untuk mencegah penyebaran Virus Covid – 19.

Mengisi Buku Tamu

Bagi setiap orang yang berkunjung ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu, harus mengisi Buku Tamu yang didalamnya berisikan tanggal kedatangan, nama, Instansi/Organisasi/Perseorangan, jabatan, alamat, keperluan dan tanda tangan. Pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu berhak untuk tidak melayani pengunjung, jika memang dirasa tidak perlu untuk memberikan informasi.

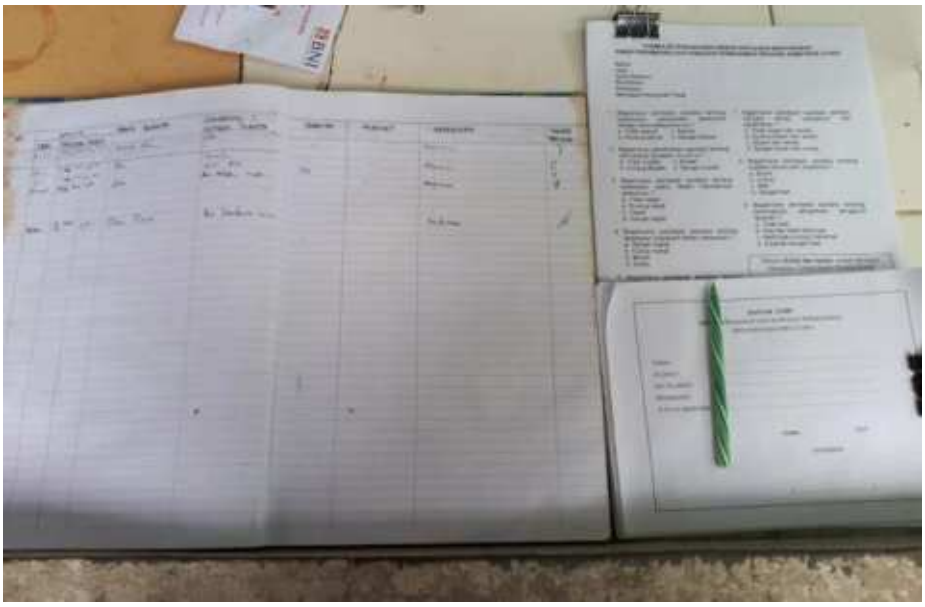

Tempat Terima Tamu

Untuk mencegah penyebaran Virus Covid – 19, tamu yang berkunjung lebih dari satu orang di terima dan berdiskusi di tempat yang disediakan di luar ruangan kantor *(outdoor).*

Mengisi Form Permintaan Informasi

Sebelum memperoleh informasi lebih lanjut dan sebagai bahan data untuk dirangkum pada PPID, tamu yang berkunjung mengisi form yang telah disediakan yang memuat antara lain nama pengunjung, informasi yang diminta, yang melayani permintaan informasi dan tanggapan pemberi informasi.

Kotak Saran

Pengunjung setelah memperoleh informasi, selanjutnya akan mengisi kuesioner terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu serta saran-saran untuk peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang yang kemudian dimasukkan ke Kotak Saran. Adapun kuesioner tersebut akan diinput ke aplikasi Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Adapun jumlah responden yang telah mengisi kuesioner dan telah diinput berjumlah sebanyak 107 responden. (Hasil penilaian terlampir)

3.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Secara operasional PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf, yaitu :

1. Kepala Dinas selaku Atasan PPID
2. Sekretrais Dinas selaku PPID Pembantu
3. Kasubbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik selaku Sekretaris PPID Pembantu.
4. Syafri Chaniago, ST (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik) selaku Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi.
5. Habibi Lubis, ST (Staf Bidang PSU) selaku Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi.
6. Agus Tiawan Setiadi (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik) selaku Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
7. Petugas Informasi dan Pembuat Berita masing-masing seksi :
   A. Dadek Amin Hutabarat, ST
   B. Taufik Ismail Hutasuhut, ST
   C. Fitria Dewi, ST
   D. Lucky Overawaty Saragi, ST
   E. Shalima, ST

3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya

Tahun Anggaran 2020, melalui APBD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan nama kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dengan pagu anggaran setelah refocusing sebesar 232.656.000,00 *(Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)* dengan perincian sebagai berikut :

- Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 125.400.000,00 selama Satu Tahun;
- Belanja Jasa Media Cetak sebesar Rp. 32.256.000,00
- Belanja Cetak Dan Penggandaan sebesar Rp. 5.251.750,00
- Belanja Jasa Tenaga Pendukung sebesar Rp. 75.000.000,00, yang terdiri dari :
  a. Belanja Jasa Tenaga Pendukung IT sebesar Rp. 45.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 10 (sepuluh) Bulan.
  b. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Penulis sebesar Rp. 30.000.000,00 sebanyak 1 (satu) orang selama 10 (sepuluh) Bulan.

3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2020

No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Tujuan Penggunaan Informasi	Informasi Yang Diminta	Keputusan	Tanggal Jawaban
1.	12 Maret 2020	Ikhwan Hanafi Harahap	ASN Kab. Padang Lawas	Untuk pengusulan Kegiatan Pada Dinas Perumahan Permukiman Dan Perhubungan Kab. Padang Lawas	Pengusulan kegiatan 2021 untuk penataan kawasan kumuh, syarat-syarat kelengkapan apa saja.	Telah disampaikan Pedoman Penataan dan Peningkatan Kawasan Kumuh sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Usulan RAB kegiatan, surat minat dan kemudian menerima hasil kegiatan dibahas pada forum OPD Dinas PKP Provsu.	-
2.	10 Juni 2020	Doni Sanjaya	Programmer Biro Pembangunan	Pengisian data P2Sumut	Data kontrak, jadwal pelaksanaan, progres pelaksanaan untuk di entry pada aplikasi.	-	-

3.	07 Juli 2020	Deni Johansyah	ASN Dinas PKP Kab. Labura	Koordinasi RP3KP	Tata cara penyusunan RP3KP.	-	-
4.	13 Oktober 2020	Bastanta	ASN Dinas PKP Kab.Labusel	Koordinasi RTLH untuk Tahun 2021	Kelanjutan RTLH untuk Tahun 2021	-	-
5.	25 November 2020	Sutarman	Biro Organisasi Setdaprovsu.	Pembinaan Reformasi Birokrasi	-	-	-
6.	25 November 2020	Mario Chandra Sitanggang	Biro Organisasi Setdaprovsu.	Pembinaan Reformasi Birokrasi	-	-	-
7.	18 Des 2020	Wirni Zebua, ST, MS.i	ASN Dinas PKP Kota Gunung Sitoli	Penyampaian usulan RTLH dan Rumah Nelayan	Alokasi RTLH dan Pembangunan rumah khusus nelayan di Kota Gunung Sitoli	-	-

3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2020

Dalam rangka memberi informasi seluas-luasnya kepada publik, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menampilkan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk berita pada Website Dinas. Adapun untuk Tahun 2020, jumlah berita yang telah di tampilkan mulai Bulan Januari s/d Bulan Desember 2020 sebanyak 68 berita. Adapun berita tersebut terdiri dari kegiatan di lingkungan Kantor Dinas maupun kegiatan yang sifatnya di luar Kantor Dinas. (Kumpulan berita terlampir)

Bab 4
Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun Anggaran 2020, pelayanan informasi belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan adanya Virus Covid-19 , sehingga pelayanan melalui tatap muka langsung sangat terbatas. Kondisi ini juga ditambah dengan adanya jadwal WFH (*Work From House*) dan WFO (*Work From Office*), yang mana tingkat kehadiran ASN yang bekerja tidak 100 %. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana pendukung juga menjadi sebab masih belum maksimalnya pelayanan informasi.

Bab 5
Kesimpulan Dan Saran

Adapun kesimpulan akhir dari kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID antara lain :

- Website sebagai wadah publikasi kegiatan Dinas PKP Provsu;
- Sarana prasarana merupakan instrumen penting dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Pelayanan informasi kepada masyarakat pada Tahun 2020 terbatas, karena adanya Virus Covid – 19.

Sedangkan saran dapat di uraikan sebagai berikut :

- Perlunya pengembangan website;
- Perlu peningkatan sarana prasarana pendukung;

Kumpulan Berita di Website Dinas PKP Provsu

1. **Dinas PKP Provsu menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga**

February 4, 2020 Berita & Kegiatan

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga beserta rombongan

Medan – Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga beserta rombongan di Kantor Dinas jalan AH. Nasution Medan, Jum'at 31/02. Kunjungan Wakil Bupati Samosir diterima oleh Hadasa Manurung selaku Kepala Bidang PSU mewakili Kadis PKP Provsu.

Adapun maksud kunjungan kerja tersebut adalah dalam rangka menyampaikan isi-isu pembangunan di bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba telah menetapkan beberapa Desa Prioritas Pengembangan Wisata. Pariwisata yang disajikan adalah panorama alam, atraksi budaya dan kearifan lokal serta wisata air. "Kami mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menata kawasan permukiman di Desa Wisata Kabupaten Samosir" ujarnya.

Untuk penanganan Kawasan Kumuh, Kabupaten Samosir telah melakukan studi di Tahun 2019 untuk mengupdate luasan kawasan kumuh sehingga sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan hasilnya akan segera ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pemkab juga mohon bantuan untuk penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Samosir sesuai dengan kewenangan Provinsi, tambahnya.

Menanggapi permintaan Pemkab Samosir tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu menyampaikan program dan kegiatan keweangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman antara lain pembangunan PSU Permukiman, Penata Kawasan Kumuh, Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah korban bencana Provinsi. Pengusulan masing-masing kegiatan dapat disampaikan ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dengan melengkapi kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan. Penanganan di kawasan pariwisata agar lebih cepat juga dapat beraudiensi ke Dinas Pariwisara provsu yang sudah mempunyai Rencana Induk Pariwisara Daerah (RIPDA) provsu.

Dalam kunjungan tersebut dari Kabupaten Samosir turut serta Sekretaris Bappeda dan Kadis PKP dan dari Dinas PKP Provsu turut serta Kabid Rumah Swadaya, Kabid Rumah Umum dan perwakilan dari Bidang dan Sekretariat. Kunjungan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama.

2. ASN Dinas PKP Provsu Menetapkan Cara Pengisian SKP Online

February 6, 2020 Berita & Kegiatan

ASN Dinas PKP Provsu Memantapkan Cara Pengisian SKP Online

Medan – Menindaklanjuti pengisian SKP Online sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Dinas PKP Provsu melakukan *trainning* lanjutan untuk pengisian penggunaan aplikasi SKP online dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai yang sudah dilaksanakan Selasa 28/01 lalu.

Trainning lanjutan diadakan pada, Rabu 05/02 untuk para ASN agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi mengenai aplikasi. Acara di awali dengan pembukaan dan pengarahan oleh Ida Mariana Harahap selaku Kepala Dinas yang pada kesempatan tersebut menyampaikan aplikasi masih baru yang terkadang error atau lambat dalam membuka untuk melakukan pengisian SKP harian. Untuk lebih memahami aplikasi dan menu-menu yang dipergunakan penjelasan yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya sekarang lebih kepada pemantapan dan membahas kendala yang dihadapkan dalam pengisian SKP online, sambutnya.

Pemantapan mengenai pengisian SKP Online dibawakan oleh Hendra Siahaan sebagai perwakilan dari BKD provsu, "sebelum masuk ke aplikasi diharapkan user telah mempunyai bahan untuk input data, bahan merupakan kesepakatan antara staff dan atasan nya dan disesuaikan dengan tupoksi, analisis beban kerja sistem kerja. Sehingga staff sudah mengetahui uraian tugas, apa uraian nya berapa volume nya, berapa lama dikerjakan kapan dikerjakan, harus jelas terlebih dahulu target tahunan sebelum menginput ke aplikasi" tuturnya.

Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan sarana kinerja pegawai adalah masing-masing pegawai, atasan langsung, atasanan Pembanding serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Usulan target kinerja yang akan diverifikasi atasan langsung akan diteruskan ke BKD untuk diverifikasi. Kesepakatan usulan target kinerja inilah yang akan dilaporkan setiap bulan realistisnya. Aktivitas harian masing-masing pegawai juga dilaporkan melalui aplikasi SKP online.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab sampai berakhirnya kegiatan dan dihadiri oleh ASN Struktural dan staf di lingkungan Dinas PKP Provsu. Kemudian acara ditutup oleh Herizal Pulungan selaku Pl Sekertaris Dinas.(ulfa)

3. Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020

February 14, 2020 Berita & Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020

Medan – Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat, Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020, di Hermes Palace Medan, tanggal 13 Februari s/d 14 Februari 2019.

Acara tersebut dihadiri oleh Tim Teknisi dari 15 Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, yang mendapat bantuan untuk RTLH pada tahun 2020.

Kepala Dinas PKP Sumatera Utara (Sumut) Ida Mariana Harahap melakukan pembukaan dan pengarahan dalam rapat tersebut. Kadis meminta kepada Kabupaten / Kota yang menerima bantuan untuk RTLH tahun 2020 untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dan segera melengkapi berkas untuk melanjutkan jalannya program bantuan RTLH dan menanti keseriusan daerah dalam menjalankan RTLH.

"Kita harus menekankan swadaya masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan dan memastikan penerima RTLH hanya dapat satu kali menerima bantuan. Karena masih RTLH yang harus ditangani untuk memenuhi target 74% merehabilitasi RTLH pada tahun 2024. Diharapkan dana APBN dalam program BSPS turut membantu kebutuhan rumah layak huni. Kabupaten dan Kota juga wajib memiliki APBD untuk RTLH agar dapat memenuhi target" ujarnya.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara untuk menyiapkan rumah layak huni untuk Sumut yang bermartabat. Setiap tahun diperlukan minimal 20.000 ribu rumah untuk rehabilitasi RTLH. Angka tersebut hanya bisa dicapai oleh partisipasi semua Pihak, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota dan CSR Badan Usaha.

Ida Mariana juga menambahkan jika kabupaten atau kota yang ingin mendapatkan bantuan RTLH bisa dengan mengajukan kelengkapan data seperti sudah menyusun Perda RP3KP, adanya unsur RTLH dan serius dengan kelengkapan data.

Setelah melakukan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020, selanjutnya melakukan perekrutan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan konsultan provinsi yang akan membantu dalam pengawasan karena masalah yang dihadapi akan berbeda. TFL juga bertugas untuk membantu Tim Teknis untuk melakukan realisasi dan mengecek kelengkapan data.

Acara tersebut juga menghadirkan Tim Teknis RTLH Tahun 2019 dari Kabupaten langkat Beryl dan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan Bastanta, untuk berbagi pengalaman pengalaman menjalankan RTLH, *best practice* selama terlibat dim mendampingi masyarakat merehabilitasi rumah. Hal ini menjadi masukan kepada tim teknis provinsi membuat persiapan pelaksanaan RTLH T.A 2020.(ulfa)

4. **Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan rekrutmen penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pendampingan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020**

February 19, 2020 Berita & Kegiatan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu Rekrutmen penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pendampingan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020

Medan – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan rekrutmen penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk pendampingan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020 pada Selasa (18/02).

Pembukaan dilakukan oleh Kepala Dinas PKP Provsu Ida Mariana Harahap "Tahapan perekrutan sudah mulai dari seleksi berkas dan test selanjutnya test tertulis, komputer, wawancara yang akan dilaksanakan hari ini dan besok, jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh" tuturnya.

"Saya juga berharap TFL yang terpilih merupakan yang siap untuk mengerjakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab karena lokasi sebaran berada di 15 Kabupaten dan Kota yang ada juga berada di desa" ujarnya

Tahun ini Rekrutmen TFL membutuhkan 30 orang yang akan terbagi dalam 15 Kabupaten dan Kota yang terpilih mendapatkan RTLH untuk 2020, masing-masing Kabupaten Kota akan mendapatkan pendampingan oleh satu fasilitator teknik dan satu fasilitator pemberdayaan non teknik.

Berkas pelamar yang masuk sampai akhir tanggal 9 Februari 2019 sebanyak 216 berkas peserta yang diterima. 172 orang peserta yang lulus seleksi berkas dan mengikuti ujian tertulis, ujian kemampuan komputer dan melanjutkan ujian wawancara. Peserta melakukan ujian di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman terbagi pada Selasa, 18 Februari 2020 dan Rabu 19 Februari 2020. Ujian dimulai pukul 09.00 wib sampai pukul 16.00 wib. Peserta yang mengikuti ujian akan di ranking dan dipilih 30 orang dengan nilai tertinggi.

Tenaga Fasilitator yang terpilih nantinya akan disebar di 15 Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, yang mendapat bantuan untuk RTLH pada tahun 2020.(ulfa)

5. KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH KORBAN BENCANA

February 24, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH KORBAN BENCANA

Ulu Pungkut, Mandailing Natal – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Ida Mariana Harahap melakukan peresmian Rumah Korban Bencana Alam Banjir dan Longsor yang terjadi tahun lalu di Dahu Lomban Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandialing Natal, Sabtu (22/02).

Pemerintah Provinsi Sumut, membangun sebanyak 26 unit rumah. Pembangunan relokasi sudah rampung diselesaikan 100% sudah siap untuk ditempati. Tinggal menunggu pemasangan listrik dan istalasi air bersih untuk segera di tempati warga. Rumah tersebut dipastikan akan menjadi hak milik warga yang direlokasi.

"Ini akan menjadi hak milik bapak dan ibu, biar tidak ada yang menggangu gugat. Tapi jangan lagi bapak menempati rumah yang lama. Kalau bisa rumah yang lama dirobohkan saja, untuk ditanam pohon juga boleh," ujar Gubernur kepada para warga saat meninjau perumahan di Simpang Duhu Lombang Kecamatan Ulu Pungkut, Sabtu (22/2).

Gubernur juga meminta Bupati Madina agar membantu pemasangan listrik dan instalasi air agar dapat segera ditempati oleh warga yang direlokasi. "Segera ini harus bisa ditempati. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak Bupati untuk menanyakan kapan air ini bisa dialirkan ke sini. Jangan tunggu bulan lima, kalau bisa bulan puasa sudah mereka tempati rumah ini. Bapak dan ibu pun mohon bersabar karena ini juga ada aturannya," tambah Edy Rahmayadi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Ida Mariana Harahap menjelaskan bahwa seluruh rumah ini adalah untuk para korban bencana banjir bandang dan longsong yang menerjang Desa Muara Saladi tahun lalu. "Untuk membangunnya kita menggunakan alokasi APBD Tahun Anggaran 2019. Kita juga membangun jalan untuk akses ke perumahan serta dinding penahan tanah agar tidak terjadi longsor,"terangnya.(ulfa)

6. KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH BERBASIS KOMUNITAS

February 24, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH BERBASIS KOMUNITAS

Padangsidempuan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Ketua TP PKK Pemprovsu Nawal Rahmayadi bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana Harahap meninjau dan melakukan peresmian Bantuan Pembangunan Baru Rumah Berbasis Komunitas Tahun 2019.Penerima bantuan adalah komunitas pekerja bangunan di Desa Purba Tua Kec. Padangsidempuan Tenggara, Minggu (23/02).

Peresmian diawali dengan pemotongan pita oleh Nawal Rahmayadi di damping Gubsu bersama Kadis PKP Provsu Ida Mariana, Walikota Padangsidempuan dan Kadis PKP Padangsidempuan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ida Mariana menjelaskan rumah yang mendapat bantuan sebanyak 74 unit rumah. Pembangunan rumah ini merupakan bagian dari program satu juta rumah oleh Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, melalui dana APBN T.A 2019.

Dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Pemprov Sumatera Utara. Pemerintah Kota Padangsidempuan mematangkan lahan menyediakan sarana air minum, tempat pengolahan sampah dan limbah. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provsu membangun fasilitas perkerasan jalan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). (ulfa)

7. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KOTA TANJUNG BALAI

February 26, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu meneria kunjungan kerja dari Komisi "C" DPRD Kota Tanjung balai. Rombongan Komisi "C' ini dipimpin oleh Eriston Sihaloho. Pertemuan diadakan di Kantor Dinas Jalan A.H Nasution Medan (26/02).

Kunjungan Kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Ida Mariana M.Si didampingi Kabid Rumah Umum, Kabid Rumah Swadaya, Kabid Kawasan Permukiman, dan Kabid PSU. Dalam kunjungannya DPRD Kota Tanjungbalai ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Sumatera Utara.

Kepala Dinas PKP Provsu telah menjelaskan Tupoksi Dinas, Penyelenggaraan urusan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Kumuh, penyelenggaraan PSU Permukiman dan pembangunan Rumah Relokasi Korban Bencana serta Fasiliasi Penyediaan Rumah Korban Pembangunan Daerah.

Komisi "C" DPRD Kota Tanjungbalai meminta petunjuk dan penjelasan langkah apa yang dapat dilakukan bila ada penyimpangan dalam mekanisme Rehab RTLH. Setelah itu, Kabid Rumah Swadaya turut menjelaskan mekanisme pemilihan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta pemilihan panglong penyedia bahan bangunan oleh masyarakat.

Kadis PKP Provsu juga berpesan agar daerah juga proaktif mengusulkan dan mempersiapkan masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. DPRD dan Pemkab/Pemko harus memahami Juknis Pelaksanaan dari masing-masing pembiayaan Rehab RTLH. Apabila ada penyimpangan, pemprov sangat terbuka untuk saran solusi perbaikan serta menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kadis PKP provsu juga mengingatkan bahwa program ini memiliki nilai sosial yang tinggi yang harus diimbangi dengan komitmen tanpa kutipan. Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)

8. FGD RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA DI KAWASAN KEK SEI MANGKEI

March 3, 2020 Berita & Kegiatan

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA DI KAWASAN KEK SEI MANGKEI

Medan – Agus Tripriyono mewakili Gubernur Sumut membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut (03/03). FGD tersebut mengangkat topik "Project Development Fund KPBU Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun".

"Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berterimakasih kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, dan PUPR karena telah membantu provsu dalam pendampingan dan asistensi dalam penyiapan permohonan Project Development Fund untuk Kegiatan Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun, dan kepada Tim Simpul KPBU dan Tim Pembangunan Perumahan di Kawasan KEK Sei Mangkei" ujarnya

Pasca ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama di Sumatera Utara, yang difokuskan untuk jadi Pusat Pengembangan Industri Kelapa Sawit Hilir dan *Rubber City* Skala Besar dan Kualitas Internasional. Pemerintah Pusat menilai pemprovsu sangat serius dalam project ini dan mendukung langkah-langkah percepatan.

Rangkaian acara FGD dimilai dengan pemaparan materi dan kajian terlebih dahulu oleh Ir. Ida Mariana MSi selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang membawahi Project Development Fund KPBU Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun. Pengelola Sei Mangkei sendiri sangat mendukung dan merasa terbantu dengan akan adanya Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei sehingga bisa dimanfaatkan oleh Badan Usaha kawasan tersebut.

FGD berlangsung sangat intens dan menarik. Hal ini tampak dari antusiasme para peserta yang hadir saat memberikan pertanyaan, saran dan masukan setelah Kadis Dinas PKP Ir. Ida Mariana Harahap M.Si selesai menyampaikan materi.

Acara kemudian ditutup oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Aset dan SDA Agus Tripryono dengan mengucapkan terima kasih hadirin yang datang dari seluruh peserta dari berbagai latar belakang diantaranya Pemkab Simalungun, Pengelola KEK Sei Mangkei, OPD Pemprovsu terkait, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Insfrastuktur Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian PUPR.

9. SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN KELUAR (SISUMAKER) DI LINGKUNGAN DINAS PKP PROVSU

March 9, 2020 Berita & Kegiatan

SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN KELUAR (SISUMAKER) DI LINGKUNGAN DINAS PKP PROVSU

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mendapatkan kunjungan Sosialisasi mengenai sistem informasi surat masuk dan keluar (SISUMAKER) dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provsu. Kedepannya, surat menyurat sudah akan dilakukan dengan teknologi elektronik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan sistem persuratan.

Rido Meivala sebagai perwakilan Kominfo yang menyampaikan Sosialisasi mengenai SISUMAKER. Hadirin yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah seluruh eselon IV dan eselon III di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provsu. Para Eselon 4 dan Eselon 3 terlebih dahulu harus membuat akun di *http://sisumaker.sumutprov.go.id/* untuk bisa menggunakan SISUMAKER.

"Di dalam sistem dijelaskan bahwa draft surat keluar dibuat oleh eselon IV naik ke eselon III kemudian ke Sekretaris dan akhirnya naik ke Kepala OPD. Jika di dalam draft surat ada kesalahan atau kurang sesuai, penerima surat bisa melakukan penolakan draft surat dan draft surat akan kembali ke pengirimnya, penerima draft surat bisa juga langsung melakukan revisi dan melanjutkan surat hingga ke Kepala OPD" jelasnya.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengembangan e-government Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, sesuai dengan Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

Pada saat ini terjadi perubahan era yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efesiensi aktivitas manusia. Era revolusi industri 4.0 tidak saja memiliki dampak terhadap dunia usaha dan industri namun juga terhadap lingkungan birosistekrasi pemerintah. Harapan dengan sistem ini terlaksana arsip surat lebih tertata, mendukung paperless, dapat melaksanakan tugas dengan lebih cepat dengan pemanfaatan teknologi. (ulfa)

10. RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) SENSUS PENDUDUK 2020

March 10, 2020 Berita & Kegiatan

RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) SENSUS PENDUDUK 2020

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi salah satu narasumber di dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Penduduk 2020 (10/03), yang dibuka oleh Sekda Provsu Sabrina yang ditandai dengan pemukulan gong yang didampingi oleh Kadis PKP Provsu, Kadis Dukcapil, Dinas Kominfo, Kepala BPS Sumut dan para Kabag di BPS Sumut.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan harapan Gubernur kepada seluruh kalangan untuk turut mensukseskan Sensus Penduduk 2020, dan juga turut membantu petugas sensus dalam menjalankan tugasnya nanti. Para ASN juga diharapkan menjadi contoh baik dalam melakukan pengisian Sensus Penduduk Online.

Acara dilanjutkan dengan melakukan Panel diskusi yang diisi oleh Kadis PKP Provsu, Kadis Dukcapil dan Perwakilan Dinas Kominfo. Ida Mariana Harahap memaparkan pentingnya mengisi Sensus Penduduk Online Tahun 2020. Kadis PKP provsu menyoroti kesulitan masyarakat memperoleh informasi pembelian rumah yang terjangkau dan lokasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat mengakses Aplikasi SiKasep dan SiKumbang dan memudahkan masyarakat nantinya jika ingin melakukan pembelian rumah melalui aplikasi tersebut.

Pengisian sensus penduduk online juga dapat membantu Dinas PKP Provsu untuk mengetahui data mengenai permasalahan Backlog Pemilikan dan Backlog Penghunian yang dimiliki oleh Sumatera Utara yang masih teratasi 10-15 ribu rumah tiap tahunnya.

"Pengisian sensus penduduk online juga sesuai dengan visi-misi Gubernur Sumatera Utara untuk Sumut yang Bermartabat dimulai dengan mempunyai rumah layak huni untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara" ujarnya.

Ir. Ida Mariana Harahap M.Si sangat mendukung semua kalangan masyarakat untuk mensukseskan Sensus Penduduk Online dengan sebenar-benarnya dan memberikan data yang valid untuk pengisian Sensus Penduduk Online. Karena data yang masuk nantinya akan membantu dalam menyelesaikan masalah perumahan selanjutnya.

Dukungan Dinas PKP provsu yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pengisian sensus penduduk online 2020 di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provsu.(ulfa)

http://dispkp.sumutprov.go.id/updated/2020/03/02/sosialisasi-pengisian-sensus-penduduk-2020-online/

11. PELATIHAN DAN PEMBEKALAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU PROVSU T.A 2020

March 11, 2020 Berita & Kegiatan

PELATIHAN DAN PEMBEKALAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU PROVINSI SUMATERA UTARA T.A 2020

Medan – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu melakukan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Rehabilitasi (TFL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara T.A 2020 di Garuda Plaza Hotel Medan. (11/03)

Pembukaan dilakukan oleh Herizal Pulungan selaku Pl. Sekretaris Dinas mewakili Kadis Perumahan Kawasan Permukiman provsu. "Pelatihan dan pembekalan dilakukan untuk mendapatkan TFL yang berkualitas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk memverifikasi, identifikas keswadayaan, rembuk warga, pelaksanaan serta monitong dan pengawasan" tuturnya.

"Saya berharap peserta TFL untuk mengikuti kegiatan dengan penuh atensi dan berperan aktif dalam sesi diskusi maupun simulasi dan dapat mengaplikasikan dalam tugas dilapangan nanti" ujarnya.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Rehabilitasi (TFL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara T.A 2020 dilakukan mulai tanggal 11-13 Maret 2020. Sebelum memulai penyampaian materi para peserta diminta untuk melakukan pre-test untuk mengukur kemampuan pehamanan sebelum mengikuti pelatihan dan pendampingan TFL, dan setelah menerima materi dan diskusi nanatinya para TFL ini akan melakukan post test guna mengetahui sejauh mana pengertian dan pemahaman yang sudah diterima oleh TFL.

Tenaga Fasilitator ini akan melakukan rembuk warga dan harus menguasai materi dan menguasi hal-hal teknis yang akan dihadapi. TFL nantinya juga akan didampingi dan dibantu oleh Tim Teknik dan Tim Konsultan untuk menjalankan tugasnya.

Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Rehabilitasi (TFL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu Provinsi Sumatera Utara T.A 2020 bertujuan agar TFL dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya agar dapat mendukung pelaksanaan rehab RTLH sehingga rehab RTLH dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

12. CAPACITY BUILDING TRAINING DINAS PKP PROVSY DAN SNVT DI PULAU SIBA

March 16, 2020 Berita & Kegiatan

CAPACITY BUILDING TRAINING DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVSU DAN SNVT DI PULAU SIBA

Pulau Siba – Capacity Building Training Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provsu dan SNVT di Pulau Siba, Jumat-Sabtu (13-14 Maret) berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan. Dalam acara tersebut membangun fokus, komunikatif, teamwork dan saling melengkapi.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana M.Si menyampaikan bahwa teamwork dan komunikasi terbuka penting untuk membangun sinergi untuk pemcapai tujuan pembangunan di Dinas PKP provsu. Capacity Building Training merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Dinas PKP untuk membangun fokus, komunikatif dan teamwork sangat penting untuk membangun sinergi kerja yang baik, ujarnya

Rangkaian kegiatan Capacity Building Training melakukan beberapa permainan antara lain memasukan gelang ke dalam pipa dengan tidak boleh dilemparkan, memindahkan bola pimpong menggunakan paralon secara bergantian dari garis start sampai kegaris finish, dan memindakan bola menggunakan tali dari satu titik ke titik lain sampai ke garis finish dan beberapa permainan lain nya.

Kebersamaan terlihat dari masing-masing tim yang mempunyai yel-yel dan ciri khas sendiri. Meskipun terbagi dalam tim berbeda, namun suasana gembira, santai, dan focus menandai kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut.

Kegiatan Capacity Building Training dilaksanakan di Pulau Siba yang terletak di Hamparan Perak – Deli Serdang, Dinas PKP provsu memilih lokasi ini agar turut mengambil andil dalam mendukung wisata lokal di Sumatera Utara. Selain kegiatan capacity building training, para peserta juga dapat meikmati suasana asri dan dapat memancing ikan di pinggir Pulau Siba.

13. KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI PADA KEK SEI MANGKEI

March 18, 2020 Berita & Kegiatan

KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI PADA KEK SEI MANGKEI

Sei Mangkei – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi pembicara pada acara Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Rusunawa Terintegrasi Pada KEK Sei Mangkei Desa Perdagangan 2 Kec. Bandar Kab. Simalungun (17/03). Acara dibuka oleh Ida Mariana Harahap dihadiri oleh Staff Ahli Gubernur Pembangunan dan Aset Agus Tripriyono, Pemprov, Pemkab Simalungun, Pengelola KEK Sei Mangkei, masyarakat Sei Mangkei dan tokoh masyarakat dan unsur terkait.

Dalam sambutannya Ida Mariana Harahap menyampaikan mengenai mengenai Rusunawa Terintegrasi kepada masyarakat sekitar Sei Mangkei mengenai pembangunan Rusunawa terintegrasi yang akan dibangun ini.

"Pembangunan nantinya akan membuka lapangan kerja baru yang nantinya akan diutamakan masyarakat disekitar KEK Sei Mangkei" ujarnya.

Dalam acara tersebut masyarakat terlihat antusias dan tidak ada penolakan mengenai pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei. Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei akan ditepati oleh para pekerja dikawasan KEK Sei Mangkei dan bisa juga di tempati oleh warga sekitar KEK Sei Mangkei. Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei nanti juga akan terintegrasi ke Kuala Tanjung, dan nanti dekat dengan TOL yang akan dibangun juga. Pembangunan Rusunawa Terintegrasi ini rencananya akan di mulai akhir bulan Maret ini mungkin mundur dari jadwalnya karna wabah Virus Corona (COVID-19). KEK Sei Mangkei ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama di Sumatera Utara, yang difokuskan untuk jadi Pusat Pengembangan Industri Kelapa Sawit Hilir dan *Rubber City* Skala Besar dan Kualitas Internasional.

Pemerintah Kabupaten dan dusun Sei Mangkei mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena turut membantu memajukan kawasan Sei Mangkei yang akan membawa perubahan baik pada bidang ekonomi nantinya setelah KEK Sei Mangkei nanti selesai masyarakat sekitar dapat mendukung menyediakan barang dan jasa mendukung pertumbuhan kawasan ini. Selain pembangunan Rusunawa Terintegrasi nantinya akses jalan menuju KEK Sei Mangkei akan diperbaiki sejalan dengan terbangunnya KEK Sei Mangkei.

14. KADIS PKP INSTRUKSIKAN GERAKAN CUCI TANGAN DAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SELURUH RUANGAN KANTOR

March 20, 2020 Berita & Kegiatan

Cegah Penyebaran Corona, Kadis Instruksikan Gerakan Cuci Tangan dan Penyemprotan Disinfektan Seluruh Ruangan Kantor

Medan – Dalam rangka mengikuti arahan Gubernur Sumatera Utara dalam langkah pencegahan Covid-19, Kepala Dinas PKP provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si melakukan arahan untuk mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19 (Virus Corona). Gerakan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan juga diikuti oleh para pegawai Dinas PKP provsu di Kantor Dinas PKP provsu (20/3).

Gerakan mencuci tangan direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) maupun otoritas kesehatan di berbagai negara terus mendorong kebiasaan hidup sehat

terutama mencuci tangan. Virus menyebar melalui droplet (tetesan) cairan dari batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus corona. Tetesan tersebut bisa jatuh ke permukaan mana pun dan tangan akan jadi alat transportasi virus dari permukaan yang terkontaminasi lantas masuk ke tubuh. Orang pun didorong untuk tidak sembarang menyentuh mata, hidung dan mulut.

Cuci tangan dengan sabun terlihat sebagai kegiatan sepele dan meragukan namun merupakan cara yang ampuh menangkal virus yang sudah membunuh lebih dari tiga ribu orang tersebut.

Gambar dibawah merupakan 7 Langkah Mencuci Tangan dengan benar. #TangkalCorona #TangkalCovid19

Selain pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas PKP, tamu yang datang di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman juga mengikuti mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan kantor Dinas PKP Provsu.

Penyemprotan Disinfektan ke seluruh ruangan kantor juga dilakukan, hal ini merupakan sebuah upaya untuk mensterilkan ruangan kerja dari kemungkinan penyebaran Virus Corona. (ulfa)

Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia.pdf Download

15. **KADIS PKP PROVSU MELAKUKAN RAPAT MELALUI VIDEO CONFERENCE TERKAIT PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRITAS PADA KEK SEI MANGKEI**

March 24, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MELAKUKAN RAPAT MELALUI VIDEO CONFERENCE TERKAIT PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRITAS PADA KEK SEI MANGKEI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana M.Si menindaklanjuti pertemuan sebelumnya terkait Pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei, TIM KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei melakukan video conference di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (24/3).

Video conference dilakukan sebagai pengganti rapat langsung yang tidak bisa dilakukan karena wabah Covid-19 yang terjadi. Video conference ini di ikuti oleh Hanny J Salendu Perwakilan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan PUPR, Hariyudo Yuwono dan Insyafiah Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Yunan Novaris dan Dally Ramdhan Perwakilan PT. Penjaminan Infrastuktur Indonesia, M Ismail Sinaga Kepala BPKAD provsu, Agus Tripriyono Asisten Ekbang provsu sebagai Sekretaris KPBU Sumut. Kepala Dinas PKP provsu didampingi oleh Kabid PSU dan para staf serta Tim KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei.

Pada video conference, Ida Mariana menjelaskan proges mengenai Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei, dan sudah melakukan persiapan dari masukan pada saat pertemuan sebelumnya dan memaparkan rencana kedepan mengenai sasaran utama mengenai Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei yang pertama bagi pekerja KEK Sei Mangkei, kedua untuk MBR sekitar KEK Sei Mangkei dan untuk pembangunan infrastruktur KEK Sei Mangkei Di Sumatera Utara.

Yang mendesak pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei karena sudah ada lebih kurang sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) pekerja yang mempunyai tempat tinggal cukup jauh menuju lokasi KEK sekitar 15 KM dengan resiko pekerja cukup tinggi baik keterlambatan, kelelahan dan rawan kecelakaan karena melintasi jalan jalan nasional dan ekonomi yang tidak menyebar secara merata.

Komitmen Gubernur Sumut setelah melakukan FGD dilokasi, masyarakat sudah sangat mendukung dan menerima pembangunan yang akan dilaksanakan, setelah melakukan market sounding Gubsu akan segera melakukan permohonan PDF dan menunggu arahan selanjutnya dari KPBU pusat mengenai arahan selanjutnya.

Tanggapan pemerintah pusat terhadap Dokumen Persiapan Project adalah agar pemprovsu konsisten memastikan pola pembiayaan KPBU ini. Serta menambah point- point keunggulan berinvestasi di Lokasi KEK Sei Mangkei antara lain sebuah lokasi yang strategis dan terbesar dalam bisnis produksi palm oil serta memiliki nilai investasi return yang baik. Dan juga menyampaikan dukungan pemrintah daerah di lokasi ini.

Pemprov akan menindaklanjuti arahan perbaikan dari pemerintah pusat, serta akan mengirimkan hasilnya, sehingga target market sounding ini dapat segera terealisasi.

Video conference yang dilakukan merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei. Video conference dilakukan juga dilakukan sebagai bentuk lain rapat yang biasanya bertatap langsung dikarenakan masih mewabahnya Covid-19.(ulfa)

16. PEDOMAN PENANGANAN CEPAT MEDIS DAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19 DI INDONESIA

March 25, 2020 Berita & Kegiatan

PEDOMAN PENANGANAN CEPAT MEDIS DAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19 DI INDONESIA

Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh World Health Organization (WHO) 2020. Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 275,469 jiwa yang tersebar di 166 negara, termasuk Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19. Dalam rangka penanganan cepat COVID-19 diperlukan Pedoman Penanganan Cepat Medis Dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada pelaksana teknis lapangan dan respon masyarakat terhadap kasus COVID-19. Pedoman ini meliputi, komunikasi informasi dan edukasi masyarakat (KIE) tanpa tatap muka; manajemen tata kelola pasien dan rujukan calon pasien; tata kelola rapid test dan pemeriksaan laboratorium lain; tata kelola pasien di rumah sakit; tata kelola karantina dan isolasi; dan penanganan pasien meninggal. Pedoman ini disusun berdasarkan hasil diskusi tim pakar Gugus Tugas COVID-19, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan, Protokol Kantor Staf Presiden, dan sebagainya.

Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia.pdf Download

17. Rapat Video Conference Tindak Lanjut Pramusrenbang Provsu Untuk Penyusunan Renja Dinas PKP Tahun 2021

April 7, 2020 Berita & Kegiatan

Rapat Video Conference Tindak Lanjut Pramusrenbang Provsu Untuk Penyusunan Renja Dinas PKP Tahun 2021

Medan – Dalam rangka menindaklanjuti Pra Musrembang provsu untuk perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Utara terkait dengan pembatasan pertemuan yang melibatkan banyak orang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dinas PKP provsu melakukan rapat melalui Video Conference dimulai tanggal 7 s/d 9 April 2020.

Kegiatan Video Conference pada Selasa 7 April 2020 untuk peserta dari kawasan pantai timur dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pagi diikuti 8 peserta dari Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara, Kota Medan dan Kota Binjai. Sesi Siang diikuti 6 peserta dari Kab. Asahan, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kota Tebing Tinggi dan Kota Tanjung Balai.

Hari berikutnya dijadwalkan untuk diikuti peserta dari Kabupaten / Kota dari kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Barat

Kegiatan Video Conference dibuka oleh arahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara – Ir. Ida Mariana Harahap M.Si dan memberikan paparan awal kepada Kabupaten/Kota, setelah selesai melakukan paparan acara dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan perwakilan OPD Dinas Kabupaten/Kota dan perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota. Peserta yang mengikuti Video Conference juga menyampaikan usulan dan pertanyaan mengenai Renja 2021, dan akan mengirimkan berkas dokumen pendukung melalui email ataupun akan mengirimkan dokumen nya langsung ke Dinas PKP provsu paling lambat satu minggu dari sekarang

Turut berpartisipasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan Ir. Anda Subrata M.Si menyarankan agar Dinas tetap fokus kepada Prioritas usulan yang memenuhi syarat dan mendukung Visi Misi Pembangunan Gubernur Sumatera Utara

Kendala yang dihadapi dalam melakukan Video Conference adalah koneksi dengan menggunakan aplikasi yang gratis tidak stabil dan terbatas waktu. Tetapi pada sore hari bisa berjalan baik setelah dilakukan pembelian Aplikasi Zoom Meeting Online.

18. RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DPP PEMBANGUNAN RUSUNAWA KEK SEI MANGKEI

April 8, 2020 Berita & Kegiatan

RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DPP PEMBANGUNAN RUSUNAWA KEK SEI MANGKEI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana M.Si melakukan Rapat Lanjutan Pembahasan DPP Pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei, Tim KPBU pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei melakukan video conference dengan tim internal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Insfastuktur PUPR di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (08/4).

Video conference dilakukan untuk mengurangi persebaran COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah terkait dengan pembatasan pertemuan yang meibatkan banyak orang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Video Conference ini diikuti oleh Perwakilan Tim Internal Kementerian PUPR khususnya Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Insfastuktur PUPR Hanny J Salendu, Stefanus Kristanto, Ervina Rahayu, Bambang Triatmoko, Hanna Anindya dan Tim Penyusun Studi Perencanaan KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei.

Pada Video Conference Ida Mariana membahas mengenai Dokumen Persiapan Projek (DPP) Pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei dan melakukan sesi tanya jawab dan masukan dan kritik mengenai DPP Pembangunan Rusunasa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei.

Pemerintah pusat menilai DPP Pembangunan Rusunawa Terintegrasi pada KEK Sei Mangkei sudah cukup baik dan hanya perlu melakukan sedikit perbaikan pada beberapa bagian saja. Selanjutnya Rapat akan dilakukan bersama dengan Tim KPBU Pusat dan memikirkan bagaimana sounding market yang tepat ditengah pandemi yang sedang berlangsung.

19. RAPAT TINDAK LANJUT PRA MUSREMBANG PROVSU KEGIATAN PADA DINAS PKP PROVSU (lanjutan)

April 8, 2020 Berita & Kegiatan

Rapat Tindak Lanjut Pra Musrembang Provsu Kegiatan Pada Dinas PKP Provsu (Lanjutan)

Medan – Hari ke-II Rapat Tindak Lanjut Pra Musrembang Provsu Kegiatan Pada Dinas PKP Provsu melalui Video Conference pada Rabu, 8 April 2020 untuk peserta dari kawasan pantai Barat diikuti 7 peserta dari Kota Sibolga, Kab. Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Mandailing Natal.

Kegiatan Video Conference dibuka oleh arahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara – Ir. Ida Mariana Harahap M.Si dan memberikan paparan awal kepada Kabupaten/Kota, setelah selesai melakukan paparan acara dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan Kepala OPD Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota ataupun yang mewakili.

Peserta yang mengikuti Video Conference juga menyampaikan usulan dan pertanyaan mengenai Renja 2021 dan akan mengirimkan berkas dokumen pendukung melalui email ataupun akan mengirimkan dokumen nya langsung ke Dinas PKP provsu paling lambat satu minggu dari sekarang. Beberapa kabupaten/kota juga ada yang bertanya mengenai pemangkasan anggaran untuk fokus terhadap penanggulangan COVID-19. Ida Mariana juga menyampaikan bekerja harus sesuai dengan aturan dan mengikuti segala SOP yang berlaku pada saat pandemic COVID-19, agar tidak menjadi carrier dan menyebarkan penyebaran COVID-19.

Turut berpartisipasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan Ir. Anda Subrata M.SI menyarankan agar Dinas tetap fokus kepada Prioritas usulan yang memenuhi syarat dan mendukung Visi Misi Pembangunan Gubernur Sumatera Utara, dan bekerja sesuai dengan SOP agar tidak menyebarkan pandemic COVID-19.

Penyelenggaraan Video Conference hari ke – II berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti.(ulfa)

20. RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DPP PEMBANGUNAN RUSUNAWA KEK SEI MANGKEI (Lanjutan)

April 9, 2020 Berita & Kegiatan

RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DPP PEMBANGUNAN RUSUNAWA KEK SEI MANGKEI (LANJUTAN)

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap M.Si diwakilkan oleh Tim KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei Provsu melakukan rapat melalui Video Conference bersama dengan Tim KPBU Pusat.

Rapat Video Conference terserbut membahas mengenai kelengkapan DPP yang diajukan DPP Provinsi Sumatera Utara terhadap TIM KPBU Pusat. Rapat membahas mengenai isi DPP yang diberikan ke Tim KPBU Pusat, Tim KPBU Pusat memberikan masukan dan kritik untuk pengajuan PGF yang diajukan oleh Tim KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei.

Tim KPBU Pusat memberikan beberapa masukan untuk nambah masukan dasar-dasar hukum dan memperhatikan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Tim KPBU Pusat juga meminta untuk merincikan beberapa bagian dari DPP.

21. RAPAT VIDEO CONFERENCE TINDAK LANJUT PRAMUSREMBANG PROVSU UNTUK PENYUSUNAN RENJA DINAS PKP PROVSU TAHUN 2021

April 9, 2020 Berita & Kegiatan

RAPAT VIDEO CONFERENCE TINDAK LANJUT PRAMUSRENBANG PROVSU UNTUK PENYUSUNAN RENJA DINAS PKP TAHUN 2021 HARI KE-III (HARI TERAKHIR)

Medan – Hari ke-III Pelaksanaan Lanjutan Rapat Tindak Lanjut Pra Musrembang Provsu Kegiatan Pada Dinas PKP Provsu melalui Video Conference pada Kamis, 9 April 2020 untuk peserta dari kawasan Dataran Tinggi diikuti 9 peserta dari Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Karo Kab. Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Kegiatan Video Conference dibuka oleh arahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara – Ir. Ida Mariana Harahap M.Si dan memberikan paparan awal kepada Kabupaten/Kota, setelah selesai melakukan paparan acara dilanjutkan dengan sesi Tanya Jawab. Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan Kepala OPD Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota ataupun yang mewakili.

Peserta yang mengikuti Video Conference juga menyampaikan usulan dan pertanyaan mengenai Renja 2021 dan akan mengirimkan berkas dokumen pendukung melalui email ataupun akan mengirimkan dokumen nya langsung ke Dinas PKP provsu paling lambat satu minggu dari sekarang. Beberapa kabupaten/kota juga ada yang bertanya mengenai pemangkasan anggaran untuk fokus terhadap penanggulangan COVID-19. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diminta untuk turut membantu melakukan partisipasi pada program. Prioritas penyelanggaraan PKP Provsu. Ida Mariana juga menyampaikan bekerja harus sesuai dengan aturan dan mengikuti segala SOP yang berlaku pada saat pandemic COVID-19, agar tidak menjadi carrier dan menyebarkan penyebaran COVID-19, terutama pada kegiatan RTLH yang banyak melakukan interaksi langsung ke masyarakat.

Turut berpartisipasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan Ir. Anda Subrata M.Si menyarankan agar Dinas tetap fokus kepada Prioritas usulan yang memenuhi syarat dan mendukung Visi Misi Pembangunan Gubernur Sumatera Utara, dan bekerja sesuai dengan SOP agar tidak menyebarkan pandemic COVID-19. "Semua usulan dari OPD provsu diharapkan sudah diterima Bappeda provsu sebelum 20 April 2020 sebagai bahan untuk pelaksanaan musrembang Provsu yang rencananya dilaksanakan pada 24 april 2020", ujarnya

Penyelenggaraan Video Conference hari ke – III berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. (ulfa)

22. KADIS PKP PROVSU MEMBERIKAN SEMBAKO DALAM KUNJUNGAN KERJA PENINJAUAN REHAB RUMAH OLEH CSR

April 18, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MEMBERIKAN SEMBAKO DALAM KUNJUNGAN KERJA PENINJAUAN REHAB RUMAH OLEH CSR

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Ida Mariana di dampingi Kepala Bidang PSU Hadasa Manurung berikan bantuan kepada keluarga kurang mampu berupa sembako sebagai rasa empati atas wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) yang di alami Indonesia dan seluruh Dunia, Jumat 17 April 2020.

Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

Virus Tersebut telah mewabah di Indonesia hingga memakan korban jiwa akibat wabah tersebut menurunnya pendapatan masyarakat.

Ida Mariana mengatakan, bantuan tersebut adalah upayanya untuk membantu masyarakat yang ekonominya melemah akibat Covid-19. Ida Mariana berharap bantuannya tersebut bisa sedikit meringankan beban masyarakat.

Bantuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut tersebut dirasa sangat membantu perekonomian warga di tengah menurunnya pendapatan mereka akibat pandemi corona seperti sekarang ini.

"Cuci tangan dengan menggunakan sabun, gunakan masker pada saat keluar rumah, hilangkan kebiasaan menyentuh wajah,mulut, hidung, bila tangan kita tidak bersih, dan jangan keluar rumah untuk hal yang tidak mendesak, tambah Ida Mariana sembari menyerahkan bantuan sembako.

Pemberian bantuan dilakukan disela-sela peninjauan Pembangunan / Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dikerjasamakan dengan CSR badan usaha pelaku pembangunan perumahan di Sumatera Utara. Pada tahap I ini terdapat empat rumah yang telah direhabilitasi di Kelurahan Labuhan deli Kecamatan Medan Marelan. (dedi)

23. MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI SUMUT, PEMERINTAH AKAN MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT

April 18, 2020 Berita & Kegiatan

MENGHADAPI PANDEMI COVID19 DI SUMATERA UTARA, PEMERINTAH AKAN MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT

Sekda Provinsi Sumatera Utara, Hj. Sabrina laksanakan Video Confrence dengan para Sekda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 2020. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi covid19 di Sumatera Utara, Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat. Disepakati juga bahwa untuk masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) akan ditanggulangi secara bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu dan terdampak akibat pandemi covid19 serta tidak terdaftar dalam DTKS akan ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan anggaran dari Dana Desa. Sehingga dengan kerjasama tersebut masyarakat dapat dibantu secara merata.

24. GUBSU DIDAMPINGI WAKIL MENGIKUTI VIDEO CONFRENCE DENGAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI SOSIAL, MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BNPB

April 18, 2020 Berita & Kegiatan

GUBERNUR SUMATERA UTARA DIDAMPINGI WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA MENGIKUTI VIDEO CONFRENCE DENGAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI SOSIAL, MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BNPB

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi wakil Gubernur Musa Rajekshah Sumatera Utara mengikuti Video Confrence dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB, pada tanggal 17 April 2020. Video Confrence juga diikuti oleh para Gubernur se Indonesia, para Bupati/Walikota se Indonesia. Kegiatan ini dilakasanakan dalam rangka relokasi dan refocusing anggaran pemerintah daerah dengan fokus kepada 3(tiga) sektor yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta fokus kepada sektor ekonomi agar tidak terdampak secara dalam sehingga dunia usaha khususnya usaha mikro dan menengah tetap dapat berjalan dengan adanya stimulus dari pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan Gubernur yang diberikan kesempatan oleh Bapak Mendagri dalam memberikan saran dan pertanyaan. Pada kesempatan tersebut Bapak Gubernur Sumatera Utara menyampaikan agar dikoordinasikan ke daerah khususnya Sumatera Utara sebagai salah satu pintu masuk tenaga kerja Indonesia dari berbagai negara agar dapat diinformasikan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat termasuk juga agar Pemerintah Pusat dapat menyampaikan kriteria dan prosedur pemberian tenaga kesehatan.

25. KADIS PKP PROVSU MEWAKILI PEMPROVSU HADIRI ACARA AKSI SOSIAL REI SUMUT PEDULI MELAWAN COVID-19

April 20, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MEWAKILI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA HADIRI ACARA AKSI SOSIAL REI SUMUT PEDULI MELAWAN COVID 19

Medan – Mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kadis PKP Provsu Ida Mariana Hadiri Serah Terima 1.200 Paket Sembako dalam Aksi Sosial Rei Sumut Peduli Melawan Covid 19, Senin 20 April 2020, di Kantor DPD Rei Sumut. Acara tersebut dihadiri, Ketua DPD Rei Sumut, Kepala Dinas PKP Provsu, Kapolsek dan Perwakilan Kodam I Bukit barisan.

Ketua DPD Rei Sumut Andi Atmoko Panggabean menyampaikan, Aksi Sosial ini di harapkan dapat meredam gejolak sosial sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari Covid 19. Karena kita ketahui dampak dari wabah covid 19 sangat besar hingga melumpuhkan perekonomian masyarakat indonesia dan masyarakat sumut khususnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rei Sumut, karena sudah peduli dengan masyarakat Sumatera utara dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat sumatera utara, sambut Ida Mariana.

Sumatera utara milik kita semua saat menyerahkan bantuan jangan dipilah-pilah, bantuan ini untuk masyarakat medan saja, tetapi diberikan keseluruh masyarakat yang paling membutuhkan, mari kita berdoa semoga pandemic covid 19 segera berakhir, tambah ida mariana.

Proses penyerahan bantuan di serehkan ke Masyarakat secara langsung, dengan membagi beberapa tim Rei Sumut ke lokasi yang dituju. (dedi)

26. MUSREMBANG RKPD PROVSU TAHUN 2021

April 23, 2020 Berita & Kegiatan

MUSRENBANG RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara " Ida Mariana"

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Perumahan Ida Mariana Harahap mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Musrembang dilakukan secara online via aplikasi ZOOM terkait dengan pembatasan pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam masa pandemic COVID-19. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan pembukaan Musrembang. Ketua DPRD Provinsi, Perwakilan Menteri Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, dan Menteri Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa turut memberikan kata sambutan dan Arahan. Musrembang Provsu diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD Pemprovsumut.

Musrenbang RKPD Provsu 2021 merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan pra musrenbang yang dibagi dalam 4 wilayah zona, Wilayah Pantai Barat dilakukan di Kab. Mandailing Natal pada 21 Februari 2020, Wilayah Pantai Timur di Kab. Langkat pada 25-26 Februari 2020, Wilayah Dataran Tinggi di Kab. Karo pada 6 maret 2020 dan terakhir Wilayah Kepulauan Nias yang direncanakan di Kab. Nias Selatan pada 18-19 Maret 2020 tetapi dibatalkan karna terhalang pandemic COVID-19, sampai Maret 2020 sudah 22 Kabupaten Kota yang melaksanakan musrembang.

Musrenbang ini merupakan amanat dari UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kemendagri Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan Evaluasi Rancangan Perkuat Daerah tentang LPJPD dan LPJMP serta tata cara pembangunan LPJPD, LPJMP dan LKPD.

Gubernur Sumatera Utara "Edy Rahmayadi" dan Wakil Gubernur Sumatera Utara "Musa Rajekshah"

Tumpak Haposan Simanjuntak menjelaskan 5 Arahan Utama Presiden Jokowi, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastuktur Penyerdehanaan Regulasi, Penyerdehanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. RKP 2021 sebelum COVID-19 meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan berkualitas, sementara RKPD Sumut Tahun 2021 adalah Pembangunan SDM Unggul, Peningkatan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat. Perubahan RKP 2021 setelah terjadi COVID-19 "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional" ujarnya.

Menteri Perencanaan Nasional Suharso Manoarfa menyampaikan arahan Presiden dalam rangka membendung COVID-19 ; Meningkatkan pengujian sampel secara massif dan melaksanakan isolasi secara ketat terhadap orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan. Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau *telemedicine* ,sehingga orang tidak perlu bertemu dengan dokter atau kerumah sakit. Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada public dengan detil dan baik. Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Menjaga kelancaran distribusi logistic yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistic dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah.

Menteri Perencanaan Nasional "Suharso Manoarfa"

Suharso Manoarfa juga menyampaikan Pemulihan dan Transfomasi Ekonomi Daerah *Refocusing* APBD Tahun 2020 untuk mendukung penanganan Covid19, penguatan jaring pengaman sosial,dan pemulihan ekonomi. Penguatan *safeguarding* (monitoring, pengendalian dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid19 termasuk penanganan kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi agar tetap berjalan transparan, akuntabel efisien dan efektif. Penentuan usulan kegiatan 2021 yang benar-benar mendukung prioritas nasional dalam RKP 2021, mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah, dan mendorong transformasi ekonomi. Penguatansinergi kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD, Dana Transfer Daerah, Dana Desa, investasi swasta dan sumber pendanaan lainnya.

Penyusunan RKPD 2021 didalam situasi yang tidak pasti, karena status Siaga Darurat Bencana Non-alam Corona Virus. Pemerintah memprediksi ini akan berlangsung sampai akhir 2020. Penyusunan target kinerja kedepan perlu diperhitungkan kembali mengingat dampak luas dari bencana ini.

Musrenbang Provsu dilanjutkan besok tanggal 24 April 2020 dengan arahan dari Bappeda Pemprovsu bersama OPD dan Bappeda Kab/Kota. (ulfa)

27. KADIS PKP SERAHKAN BANTUAN PEMPROVSU DI KEC. MEDAN TUNTUNGAN

April 24, 2020 Berita & Kegiatan

Kadis PKP Serahkan Bantuan Pemprov Sumut di Kecamatan Medan Tuntungan

Medan – Kadis PKP Provsu Ida Mariana di dampingi Kasubag Umum dan kepegawaian Beslida Shamawati, melakukan penyerahan bantuan Paket Sembako, untuk masyarakat di sekitar daerah Kecamatan Medan Tuntungan. (Jumat 24/4).

Total Bantuan yang diserahkan sebanyak 100 Paket yang terdiri dari 20 Paket diserahkan langsung dikantor Kecamatan Medan Tuntungan dan diterima langsung oleh Camat Medan Tuntungan Topan OP Ginting, dan 80 Paket Sembako dibagikan langsung dari rumah ke rumah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan keramaian masyarakat untuk menjaga sesuai dengan aturan Sosial Distancing agar memutus rantai penyebaran.

Topan OP Ginting mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Seluruh Pegawai Pemprovsu dan Kadis PKP Provsu atas penyampaian bantuan sebanyak 20 paket dan 80 paket lagi akan diserahkan langsung ke rumah-rumah warga, "semoga menjadi berkah buat semua yang membutuhkan di Kecamatan ini terutama menyambut bulan suci Ramadhan", ujarnya

Bantuan paket sembako berasal dari Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 5 kg beras, 1 L minyak makan dan 1 kg gula putih ini merupakan bentuk upaya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membantu meringankan beban masyarakat yang diakibatkan dari pandemic COVID-19. (ulfa)

28. DISIPLIN CEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) MULAI DARI DIRI SENDIRI

April 26, 2020 Berita & Kegiatan

DISIPLIN Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai Dari Diri Sendiri

Disiplin Cegah Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Mulai Dari Diri Sendiri :

1. **Menggunakan Masker** Jika Berada di Luar Rumah ataupun Ditengah Keramaian
2. **Cuci Tangan** Sesering Mungkin Mencuci Tangan Menggunakan Sabun dan Air Mengalir
3. **Hindari Keramaian / Phisical Distancing** Jaga Jarak Minimal 2 Meter, Hindari Kontak Langsung Dengan Orang Lain
4. **Isolasi Mandiri** Bagi Warga Yang Memiliki Riwayat Perjalanan Ataupun Telah Berhubungan Langsung Dengan Pasie

29. MUSREMBANG RKPD PROVSU TAHUN 2021 HARI KE-II (Lanjutan)

April 27, 2020 Berita & Kegiatan

MUSRENBANG RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 HARI KE-II (lANJUTAN)

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera mengikuti Hari Ke- II Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Musrenbang dilakukan secara online via aplikasi ZOOM terkait dengan pembatasan pertemua yang melibatkan banyak orang dalam masa pandemik COVID-19. Kepala Bappeda provsu Hasmirizal Lubis melakukan pembukaan musrenbang hari kedua dan menyampaikan arahan untuk seluruh OPD Pemprovsu. (Jumat, 25/4)

Langkah yang telah dilakukan Pemprovsu untuk percepatan penanganan COVID-19 dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sumut, pemprovsu juga sudah melakukan refocusing dan relokasi APBD T.A 2020, tidak lupa pemprovsu juga mempersiapkan sarana prasarana kesehatan yang terdiri dari 1000 kamar perawatan rumah sakit rujukan COVID-19 serta alat-alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker dan Hand Sanitizer dan penyemprotan disinfektan. Pemprovsu juga menghilangkan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam masa 3 bulan terhitung Maret s/d Mei 2020. Pemprovsu juga terus melakukan himbauan dan seruan melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No. 184/TU/III/2020 pada tanggal 16 Maret 2020, dan Pemprovsu sudah membuka Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

Dalam kesempatan tersebut Hasmirizal Lubis mengatakan "tahap pertama refocusing untuk COVID-19 ini kita sudah mengaokasikan sebanyak 502 M, dan jika dalam kondisi terburuk kita akan melakukan refokusing tahap kedua mencapai 1 Triliun sehingga fokus penanganan COVID-19 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 1,5 Triliun" ujarnya. Berdasarkan pakar hasil analisis epidemologi diperkirakan bulan Juni mulai mengalami penurunan kasus dan bulan September 2020 bisa kembali ke kehidupan normal. "Di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dibuka Toko Tani Indonesia Center dengan sistem online guna menjaga social distancing dan physical distancing yang menjual produk pangan rumah tangga ini diharapkan mampu memenuhi kebutugan pangan masyarakat dengan harga di bawah pasar, kami mengharapkan Toko Tani Indonesia Center juga ada disemua Kab/Kota Provsu" tambahnya.

Acara diakhiri dengan diskusi dengan Kepala Bappeda Kab/Kota. (ulfa)

30. RAPAT LANJUTAN RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI

May 20, 2020 Berita & Kegiatan

RAPAT LANJUTAN RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI (LANJUTAN)

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ida Mariana Harahap didampingi Tim KPBU Sumut melakukan rapat Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei Provsu melalui Video Conference bersama dengan Tim KPBU Pusat.

Rapat Video Conference terserbut membahas mengenai kelengkapan DPP yang telah dievaluasi oleh tim KPBU Sumatera Utara.

"Kita tidak pernah bosan untuk mengevaluasi kekurangan dalam membangunan rusunawa terintegrasi kek Sei Mangkei menuju perbaikan", Pungkas Ida Marina.

Dalam rapat tersebut Ida Marianan menyampaikan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim KPBU Sumatera Utara, Pertama mengevaluasi pembangunan di KEK Sei Mangkei yang nantinya di lokasi hanya membangun Rusunawa tanpa fasilitas komersil kemudian yang ke dua di lokasi membangun Rusunawa dengan fasilitas komersil tanpa PGF dengan IRR yang rendah, dan yang ketiga membangun Rusunawa dengan fasilitas komersil dengan PGF dan IRR hingga 40 %.

Selanjutnya dalam rapat tersebut Tim KPBU Pusat memberikan masukan dan kritik untuk pengajuan PGF yang diajukan oleh Tim KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei.

Tim KPBU Pusat memberikan beberapa masukan untuk nambah masukan dasar-dasar hukum dan memperhatikan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Tim KPBU Pusat juga meminta untuk merincikan beberapa bagian dari DPP. (dedi)

31. KADIS PKP PROVSU MENYAMPAIKAN BANTUAN GUGUS TUGAS COVID-19 PEMPROVSU KE KAB. DAIRI

May 30, 2020 Berita & Kegiatan

Kadis PKP Provsu Menyampaikan Bantuan Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Dairi

Sidikalang, – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana M.Si mewakili Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Kasubag Umum dan kepegawaian Beslida Sahmawati, melakukan penyerahan bantuan Paket Sembako untuk masyarakat di Kabupaten Dairi.

Penyerahan bantuan diterima oleh Kepala BPDB Kab. Dairi Ir. Sahala Tua Manik di Gedung Serba Guna Pemkab Dairi Jl. 45 Sidikalang. Total bantuan yang diserahkan sebanyak 32.146 paket sembako, yang berisikan beras 10kg, mie instan 20 bungkus, minyak makan 2 lt, gula 2 kg. Paket bantuan ini diserahkan kepada Pemerintahan Kab. Dairi dari Gugus Tugas COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang akan di distribusikan kepada masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19.

Jumat (29-05) mulai distribusikan sebanyak 2.100 paket dan akan menunggu jadwal Pemerintah Kab. dairi untuk melakukan pengiriman karena dibutuhkan tempat penyimpanan bantuan. Bantuan paket sembako akan didistribusikan oleh babinsa dan tidak membebani Pemerintah Kabupaten karena sudah ada pembagian dari Gugus Tugas COVID-19.

"Pemkab Dairi sangat berterima kasih karena hadirnya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan akan didistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 dan masyarakat miskin. Bantuan akan mulai didistribusikan pada tanggal 2 Juni 2020" ujar Sahala.

Pembagian langsung kepada masyarakat dan tidak dengan mengumpulkan orang ramai sesuai dengan protokoler COVID-19 agar tetap menjaga *social distancing*.

32. TRANSISI MENUJU NEW NORMAL, SEMUA WAJIB MEMAKAI MASKER

May 31, 2020 Berita & Kegiatan

SUMATERA

Transisi Menuju New Normal, Semua Wajib Memakai Masker

MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) memasuki masa transisi, setelah status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 berakhir 29 Mei 2020, sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/174/KPTS/2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun mempersiapkan kemungkinan pelaksanaan skenario normal baru atau new normal yang bakal diterapkan pemerintah pusat.New normal adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Skenario ini untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional."Setelah ini saya tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran lagi. Status tanggap darurat berakhir hari ini, selanjutnya kita masuk masa transisi, untuk menentukan apakah kita akan menerapkan New Normal, Disorder dan Survival. Prosesnya bisa seminggu, bisa juga dua minggu, selama itu kita akan menerima masukan dari berbagai pihak, tapi bukan berarti warga bisa dengan bebas keluyuran keluar rumah," ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memimpin rapat Petunjuk Strategis GTPP Covid 19 Pascastatus Tanggap Darurat dengan Forkopimda Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Jumat (29/5)

33. PERKENALAN SEKERTARIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PKP PROVSU

June 2, 2020 Berita & Kegiatan

PERKENALAN SEKRETARIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PKP PROVSU

"Kepala Dinas Ibu Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si memperkenalkan Sekretaris Dinas PKP Provsu yang baru"

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memperkenalkan Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata M.Si kepada para pejabat eslon III dan Eslon IV di lingkungan Dinas PKP Provsu. Ir. Anda Subrata M.Si yang di lantik pada Jumat 29-05 sebelumnya menjabat sebagai Kabid Sarana Prasarana Wilayah di Bappeda Provsu.

Selain pertemuan dan perkenalan dengan sekretaris baru Dinas PKP Provsu, dalam pertemuan itu Ida Mariana juga menjelaskan Sumatera Utara memasuki masa transisi setelah status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 berakhir 29 Mei 2020, sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/174/KPTS/2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun mempersiapkan kemungkinan pelaksanaan skenario normal baru atau new normal yang bakal diterapkan pemerintah pusat. New normal adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Sekretaris Dinas Bapak Ir. Anda Subarata, M.Si Menyapa pegawai Di Lingkungan Dinas PKP Provsu"

"Mulai hari ini semua pegawai sudah balik masuk kantor seperti biasa tetapi dengan standart kebiasaan dan prilaku sesuai dengan standart kesehatan pada saat COVID-19 dan

melaksanakan tugas masing-masing" tutur Ida Mariana.

"Mari semua bekerja sama teamwork dan tidak bekerja sendiri, karna sekertaris tugasnya membantu Kepala Dinas mengkordinasikan di bidang-bidang maupun di subbid, jika ada keluhan juga bisa di sampaikan kepada saya agar bisa sama-sama menyelesaikan semuanya dengan *teamwork* untuk meringankan beban kerja bersama dan bekerja sesuai dengan tupoksinya" ujar Anda.

Diakhir pertemuan diadakan diskusi bersama dengan seluruh anggota yang hadir di pertemuan dan perkenalan dengan Sekertaris DisPKP yang baru. (ulfa)

34. GUBSU MEMBUKA ACARA MARKET SOUNDING PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI DAN MBR SIBASA DAN TEBING TINGGI

June 12, 2020 Berita & Kegiatan

GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMBUKA ACARA MARKET SOUNDING PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI DAN MBR SIBASA DAN TEBING TINGGI

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Sekretaris Daerah R. Sabrina dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ida Mariana melaksanakan acara Market Sounding Pembangunan Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja KEK Sei Mangkei melalui Video Conference bersama dengan Tim KPBU Provinsi Sumatera Utara, BUMD, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKPM, PT. PII, PT. Sarana Multi Finance, dan calon investor Dalam dan Luar Negeri.

Market Sounding dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam sambutannya beliau mengapresiasi kinerja Kadis Perkim Provsu dan seluruh jajarannya.

Selanjutnya juga disampaikan

Pembangunan Rusunawa Terintegrasi bagi pekerja KEK Sei Mangkei melalui KPBU Provsu akan dilakukan secara professional dan proposional. Perlu diketahui bersama bahwa Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei merupakan Pilot Proyek bagi Provinsi Sumatera Utara dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sasaran Pembangunan Rusunawa Terintegrasi adalah tenaga kerja KEK Sei Mangkei, MBR Sibasa dan Hiterland serta Ex Patriat KEK Sei Mangkei.

Pada acara Market Sounding ini Moderator dibawakan oleh Herry Trisaputra Zuna dari DJPI Kementerian PUPR, dan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman sebagai Key Note Speech, sedangkan Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas Direktur Kerjasama Pemerintah dan Rancang Bangun Sri Bagus Guritno menyampaikan Dukungan Pemerintah dalam KPBU, dari Kementerian Keuangan diwakili oleh Insyafiah – Kepala Subdit Penyiapan KPBU, dan Ahmad Zaki Arifin – Vice President PT. PII sebagai Penjamin Insfrastuktur Indonesia.

Ida Mariana juga menjelaskan latar belakang masalah perlunya Pembangunan Rusunawa Terintegrasi bagi pekerja KEK Sei Mangkei karena tingginya angka backlog perumahan di Sumatera Utara serta menjawab Kebutuhan Rumah bagi pekerja/karyawan KEK Sei Mangkei jyang sangat mendesak.

MBR Hiterland SIBASA dan Tebing Tinggi perlu menjadi perhatian termasuk yang akan menyumbang kebutuhan Rumah di KEK Sei Mangkei karena berbatasan langsung, hal ini memberikan efek negative serta memberi pengaruhi yang signifikan terhadao lambannya pemngembangan wilayah yang sejalan dengan lambannya pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja KEK Sei Mangkei dan hinterland diprediksi akan segera bangkit dan bertumbuh seiring dengan terwujudnya pembangunan Kota Baru dengan berbagai fasilitas social maupun komersil. Selanjutnya Ida Mariana juga menjelaskan setelah Market Sounding hari ini (12/06/2020) akan dilanjutkan dengan Periode Penyampaian Pertanyaan oleh Investor, Periode Pemberian Jawaban atas pertanyaan oleh PJPK, dan Penyampaian feedback questionaire and Letter of Interest melalui email. Lebih kurang 10 hari kedepan akan dilakukan Video Conference yang ke-2 bagi investor yang mengajukan LOI.

Sehingga pada video conference selanjutnya sudah diketahui investor mana yang akan berminat sehingga bisa melanjutkan ke proses berikutnya yaitu pengajuan PDF ke Kementerian Keuangan, kemudian penyusunan FBC, setelah FBC akan dilanjutkan bidding kemudian kontrak, dilanjutkan kontruksi dan diharapkan selesai ditahun 2020, dan Pembangunan dapat dimulai pada triwulan I Tahun 2021. Memang Time line yang disajikan sangat optimis dapat dilakukan, walaupun pada dasarnya dibutuhkan waktu yang cukup untuk menelaah teknis dan non teknis yang harus dilakukan. PJPK berharap untuk segera merealisasikan Pembangunannya di tahun 2021. PJPK tetap dengan semangat dan berkomitmen tinggi untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demikian juga dengan Kementerian lainnya (APBN) yang turut memberikan dukungan pembangunan seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan juga ikut mendukung apa yang sudah di programkan pada Pembanunan Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei.

Akhir kata Gubernur Edy Rahmayadi menutup acara Market Sounding dengan pesan mari kita berkarya dan bekerja sesuai bidangnya dan lanjutkan Pembangunan Rusunawa KEK Sei Mangkei sembari mengucapkan terima kasih kepada BKPM, Bappenas, Kementerian Keuangan dan PT. PII yang sudah pro aktif mendukung baik dalam penyiapan dan untuk melanjutkan project ini dan bersedia mengawal sampai menuju titik akhir.

35. DINAS PKP PROVSU SAMBUT KUNJUNGAN KERJA DARI KOMISI V DPRD KABUPATEN KARO

June 18, 2020 Berita & Kegiatan

DINAS PKP PROVSU SAMBUT KUNJUNGAN KERJA DARI KOMISI V DPRD KABUPATEN KARO

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi V DPRD Kabupaten Karo. Rombongan Komisi V ini dipimpin oleh Inolia Ginting. Pertemuan diadakan di Kantor Dinas PKP Provsu Jalan A.H Nasution Medan (18/6).

Kunjungan kerja disambut oleh Hadasa Manurung, ST Kabid PSU bersama, Kabid Kawasan Permukiman, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sumut, Kasubbag Program dan Kasi Kawasan Permukiman mewakili Kepala Dinas PKP yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Kab. Dairi. Dalam kunjungannya DPRD Kab.Karo ingin mengetahui dan meminta saran tentang Relokasi Rumah korban bencana alam Erupsi Gunung Sinabung.

DPRD Kabupaten Karo meminta petujuk dan bantuan dari Dinas PKP Provsu untuk membantu tambahan Relokasi Rumah untuk korban Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung sebagai kelanjutan Relokasi Mandiri Tahap II yang baru terdata saat ini. Pola yang diharapkan untuk 169 KK pengungsi yang belum memiliki rumah adalah dengan dibangunkan langsung oleh pemerintah. Tambahan kebutuhan rumah ini telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung.

Hadasa Manurung menjelaskan jika ingin mendapatkan bantuan dari Pemprovsu atau APBN Kabupaten Karo bisa dimulai dari membuat proposal ke Pemprovsu atau APBN, kemudian Kab. Karo juga harus sudah melakukan pematangan lahan untuk Rumah relokasi korban bencana Gunung Sinabung. Realisasi proposal yang disampaikan belum dapat dipastikan karena keterbatasan anggaran di pusat dan daerah yang saat ini sedang fokus dalam penanganan Covid-19.

Diakhir pertemuan DPRD kab. Karo kembali menegaskan kesiapan mengawal penyiapan proposal oleh pemerintah kabupaten Karo. Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan kain ulos serta foto bersama.

36. SEKRETARIS DINAS PKP PROVSU MEMBUKA ACARA RAPAT PENINGKATAN KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR DI MASA COVID-19

June 22, 2020 Berita & Kegiatan

SEKRETARIS DINAS PKP PROVSU MEMBUKA ACARA RAPAT PENINGKATAN KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR DI MASA COVID 19

Medan – Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Anda Subrata M.Si mengadakan rapat dalam rangka meningkatkan keamanan dan kebersihan di lingkungan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (22/6).

Dalam rapat tersebut Sekretaris didampingi oleh Kasubag Umum Beslida Sahmawati, dan dihadiri oleh Chief Keamanan Kantor Rizah Fahruzi berserta Petugas Keamanan dan petugas Kebersihan Kantor di Dinas PKP Provsu.

Agenda rapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan kantor untuk meningkatkan rasa aman dan ketertiban di lingkungan Dinas PKP Provsu serta membahas mengenai kegiatan kebersihan kantor dalam rangka meningkatkan kenyamanan kerja dan pelayanan masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan dimasa transisi New Normal Pandemi COVID-19.

"Saya harapkan kesadaran kepada semua pihak untuk tetap menjaga jarak saat bekerja, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dan memakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19" ujarnya.

Adapun protocol kesehatan yang wajib dijalankan di lingkungan Dinas PKP Provsu ialah semua orang baik pegawai juga tamu yang akan memasuki kawasan kantor wajib memakai masker, kemudian wajib melakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermogun, wajib mencuci tangan dengan baik dan benar. (ulfa)

37. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA PJ BUPATI PAKPAK BHARAT

June 25, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA PJ BUPATI PAKPAK BHARAT

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Asren Nasution Pj Pakpak Bharat berserta rombongan. Kunjungan diterima di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (25/6).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Ir. Ida Mariana Harahap selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu. Dalam kunjungannya Asren ingin mendiskusikan terkait dengan singkronisasi program 2021 dan menindaklanjuti usulan yang sudah disampaikan antara lain Pembangunan Paret Semen Tertutup Jalan Telangke menuju RSUD Salak, Peningkatan / Rabat Beton Jalan lingkungan Kompleks Perumahan Sosial Desa Kuta Tinggi, Pembangunan Paret Semen Jalan RSUD – Tugu Pemekaran, Pembangunan Tembok Penahan Permukiman Penduduk Dusun Lae Trondi Desa Boangmanalu, Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan MCK Plus Sitellu Tali Urang Jehe, Pembangunan Jalan Lingkungan di lokasi MCK Plus Sitellu Tali Urang Jahe. Menginat keterbatasan anggaran Pemerintah Kab. Pakpak Bharat, Pj Bupati menyampaikan susulan kegiatan agar dapat ditampung di PAPBD Provsu, maupun diteruskan ke Pembiayaan APBN.

Arsen Nasution juga meminta petujuk dan bantuan mengenai Rehabilitasi RTLH yang masih banyak terjadi di Pakpak Bharat, dan melakukan singkronisasi program perumahan kawasan permukiman yang terjadi di Pakpak Bharat.

Ida Mariana Harahap menjelaskan bagaimana prosedur bantuan RTLH yang dapat diusulkan baik permohonan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun proses pengusulan bantuan ke Kementerian PUPR. "data yang diperlukan untuk membuat permohonan bisa didapatkan di Dinas PKP Kab. Pakpak Bharat dan jika mengalami kendala bisa dikordinasikan dan ditanyakan jika mengalami kendala dapat berkordinasi dengan Dinas PKP Provsu" ujarnya.

Turut serta Plt Kepala Bagian Umum, Plt Kasubbag Protokol dan Rumah Tangga Kab. Pakpak Bharat. (ulfa)

38. KADIS PKP PROVSU MENGHADIRI UNDANGAN FGD BANK INDONESIA

June 25, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENGHADIRI UNDANGAN FGD BANK INDONESIA

Medan – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menghadiri FGD (Forum Group Discussion) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Gedung BI Jl. Balai Kota No.4 Medan (Kamis 25/6).

Acara FGD dipimpin oleh Harry Handoko selaku Deputi BI Provsu tindaklanjut dari SK Gubernur Sumatera Utara no. 188.44/167/KTPS/2020 tentang *North Sumatera Invest* (NSI) karena salah satu tugas NSI adalah melaksanakan kegiatan promosi investasi dan pengelolaan dalam rangka mendorong dan mencari investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara.

Salah satu upaya promosi proyek investasi, penyelanggaraan The 3rd *Indonesia Investment Day* (IID) direncanakan pada September 2020 secara virtual. *Indonesia Investment Day* merupakan *event* yang melibatkan KBRI Singapura, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Singapura, serta investor potensial di Singapura, untuk membahas pengenalan North Sumatera Invest dan Event Promisi IID serta membahas Pembangunan Rusunawa Terintegrasi di Sei Mangkei.

Ida Mariana menyampaikan mengenai mengenai Rusunawa Terintegrasi kepada masyarakat sekitar Sei Mangkei mengenai pembangunan Rusunawa terintegrasi yang akan dibangun. "Pembangunan nantinya akan membuka lapangan kerja baru yang nantinya akan diutamakan masyarakat disekitar KEK Sei Mangkei" ujarnya.

Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei nanti juga akan terintegrasi ke Kuala Tanjung, dan nanti dekat dengan TOL yang akan dibangun juga. "KEK Sei Mangkei ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama di Sumatera Utara, yang difokuskan untuk jadi Pusat Pengembangan Industri Kelapa Sawit Hilir dan *Rubber City* Skala Besar dan Kualitas Internasional" tambahnya

Ida Mariana juga memamparkan mulai dari masa pembangunan Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei yang akan dimulai tahun 2021, serta fasilitas yang akan terintegrasi dengan Rusunawa KEK Sei Mangkei.

Acara FGD diikuti oleh perwakilan Bank Indonesia, Bappeda dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. (ulfa)

39. KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT PEMBAHASAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR KEK SEI MANGKEI T.A 2021

July 1, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT PEMBAHASAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR KEK SEI MANGKEI T.A 2021

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si mengikuti Rapat Pembahasan Dukungan Pembangunan Infrastuktur KEK Sei Mangkei T.A 2021 melalui Video Conference via ZOOM di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Rabu, 1/7).

Rapat Video Conference tersebut membahas mengenai dukungan peran Kabupaten Simalungun sehingga bisa menginput usulan-usulan pembangunan yang akan dibantu oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) jika mengalami kesulitan saat input usulan di aplikasi. Ida Mariana juga menyampaikan akan menyiapkan surat untuk Readiness criteria (RC) yang dibutuhkan. Badan Pertanahan Nasional Kab. Simalungun juga akan mempersiapkan surat yang diminta untuk menunjukkan keseriusan dalam mendukung Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei.

Sebagai tindak lanjut, Ida Mariana akan mengirimkan master plan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei kepada Dinas PU Kab. Simalungung, Bappeda, dan Dinas Tata Ruang dan PSDA Kab. Simalungun. Pada kesempatan tersebut Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perhubungan juga menyatakan dukungan terhadap Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei dengan menyiapkan Analisis dampak lalu lintas (Andalalin), dan dari Dinas Tata Ruang dan PSDA juga menyatakan siap mendukung untuk proses perizinannya. Sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara akan mempromosikan project ini di *North Sumatera Investment* (NSI) jika semua dokumen sudah 100% dilengkapi.

Diakhir rapat Video Conference Ida Mariana menyatakan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Simalungun atas dukungan terhadap pembangunan infrastuktur KEK Sei Mangkei T.A 2021. (ulfa)

40. DINAS PKP PROVSU SAMBUT KUNJUNGAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIA PERUMAHAN SUMATERA II

July 1, 2020 Berita & Kegiatan

DINAS PKP PROVSU SAMBUT KUNJUNGAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA II

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Rusli S.T, M.T Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II. Kunjungan diterima di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A. H Nasution No.20 Medan (Rabu, 01/07).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Ir. Ida Mariana Harahap selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu bersama Saiful Zuhri Kepala Satker SNVT dan Naimul Ahmad Rangkuti PPK Rumah Susun SNVT. Dalam kunjungannya Rusli S.T, M.T yang baru dilantik 23 Juni 2020 melakukan perkenalan, pengecekan progress kegiatan yang sedang berjalan, kendala yang dihadapi serta bagaimana persiapan Dinas PKP Provsu dan SNVT Provsu dalam menjalankan program pada saat masa pandemi seperti saat ini.

Kunjungan kerja ini juga merupakan ajang silatuhrami dalam rangka mempererat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (ulfa)

41. KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN FGD PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR STUDI PENDAHULU UNTUK KPBU KAWASAN OLARAGA TERPADU (SPORT CENTER) PROVSU

July 3, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN FGD PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR STUDI PENDAHULU UNTUK KPBU KAWASAN OLARAGA TERPADU (SPOR CENTER) PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memenuhi undangan FGD Pembahasan Laporan Akhir Studi Pendahu untuk KPBU Kawasan Olaraga Terpadu (*Sp Center*) Provinsi Sumatera Utara melalui V Conference di Kantor Dinas PKP Provsu. (J 3/7)

Dalam video Conference tersebut Ida Mari memberi masukan kepada semua Tim KPB Kawasan Olaraga Terpadu (*Sport Center*) " melibatkan Kementerian PUPR menyangk Teknis dari awal perencanaan dan pengan untuk pembangunan tahun 2021" ucapny

"Karna saya lihat ada pemilahan dari APBD, APBN dan KPBU ketika melibatkan APBN kita bisa memilah lagi apa yang dimasukkan ke dalam sistem perencanaan dari Kementerian Pora kemudian apa yang harus dialokasikan oleh Kementri PUPR sehingga mereka sudah mengawal dari awal pembangunan" ujarnya.

"saya sangat *concern* untuk penegasan kembali jenis-jenis yang akan kita kelompokkan ke dalam sumber dana APBD, AP dan KPBU sehingga bisa berjalan mulus nantinya dan studi ini sambil di siapkan juga" tambahnya.

FGD ini diikuti oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas, Simpul K Provsu, KEpala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu, Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pr Kadis Pemuda dan Olaraga Provsu. (ulfa)

42. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN BUPATI SAMOSIR

July 7, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN BUPATI SAMOSIR

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si menerima kunjungan kerja Bupati Samosir Rapidin Simbolon, di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan(Selasa, 07/07).

Dalam kunjungannya Rapidin ingin mendiskusikan mengenai pengajuan 10 pembangunan desa wisata di kawasan Toba yaitu Sepuluh desa wisata tersebut yaitu Sipinsur, Tipang, Marbuntoruan, Sigapiton, Meat, Tarabunga, Huta Nilintong, Huta Ginjang, Hutanagodang, dan Dolok Martumbur. Rapidin juga meminta bantuan kepada Pemprov mengenai peningkatan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Samosir.

Dalam pertemuan ini Ida Mariana Harahap menjelaskan beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemkab Samosir untuk melakukan pembangunan mulai dari Master Plan, Community Base Tourism CBT. "mengenai peningkatan kawasan kumuh yang diajukan Kabupaten Samosir pada saat Musrembang dengan luas dibawah 10 Ha merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten / Kota karena Pemerintah Provinsi menangani peningkatan kawasan Permukiman Kumuh diatas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha" ujarnya.

Usulan yang telah dikirimkan Pemkab Samosir melalui musrembang Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Panguruan, Kawasan Pantai Pasir Putih, Desa Hatoguan, Desa Janji Martahan Kec. Harian, Kab. Samosir dan Penataan Kawasan Wisata Desa Pnan Sipulo dan Desa Palipi Kab. Samosir. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama. (ulfa)

43. KADIS PKP PROVSU INGIN MENGEKSEKUSI TAPERA INI SECARA LANGSUNG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT

July 8, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU INGIN MENGEKSEKUSI TAPERA INI SECARA LANGSUNG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memenuhi undangan dari Apersi Aceh dan Sumut mengenai Sosialisasi BP TAPPERA melalui Video Conference di Kantor Dinas PKP Provsu (Rabu, 8/7).

Dalam kata sambutannya Ida Mariana Harahap menyampaikan ingin mengeksekusi tapera ini secara langsung bermanfaat bagi masyarakat, "kita mempunyai lebih kurang 43rb ASN Sumut yang belum memiliki rumah yang akan dipetakan menjadi dua yang memiliki pendapatan diatas 6,5 juta dan yang di bawah 6,5 juta, setelah dikelompokkan akan kemana dikelompokkan masih dengan FLPP yang melebur masuk ke dalam tappera atau produk tappera bisa nanti seperti FLPP itu yang paling penting kita tau supaya nanti jangan stagnan" ujarnya.

Ida Mariana menyampaikan harapan mengenai perubahan Bapertarum yang berubah menjadi Tappera segera bisa di eksekusi dan terealisasi kepada masyarakat yang membutuhkan terutama untuk ASN dan sekarang masyarakat non ASN juga bisa menggunakan tapera dengan catatan dua tahun menabung bisa mendapatkan fasilitas dari tappera produk apa saja dan sasaran kemana saja dan bisa untuk mengurangi backlog yang ada di sumut dan di aceh.

Keanggotaan TAPPERA mencakup seluruh warga negara Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi backlog yang terjadi sejak awal berdiri nya negara Indonesia. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah juga ingin terlibat dalam program TAPPERA ini. Landasan hukum TAPPERA sesuai dengan UU No.4/2016 dan PP No.25 Tahun 2020 yang mendasari UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun, untuk pembiayaan perumahan pemerintah mempunyai anggaran dari APBN seperti FLPP. TAPPERA merupakan program mandiri yang didasari pembiayaan dari iuran atau tabungan dari peserta. Sekarang TAPPERA memang masih berfokus untuk ASN, tetapi kedepan nya akan terbuka untuk semua mulai dari TNI-Polri, pewagai BUMN, BUMN, Swasta.

TAPPERA difokuskan untuk yang berpenghasilan batas UMR sampai dengan gaji 8jt / bulan, yang bisa menikmati fasilitas dari program TAPPERA. Produk TAPPERA yakni kepemilikan rumah atau KPR, untuk pembangunan baru di lahan sendiri serta untuk perbaikan atau renovasi rumah yang sudah dimiliki. Khusus peserta baru bisa menikmati program dari TAPPERA setelah 2 tahun bergabung, penerimaan peserta baru dimulai tahun 2021. (ulfa)

44. KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN WEBINAR TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI VIDEO CONFERENCE

July 17, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN WEBINAR TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI VIDEO CONFERENCE

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si memenuhi undangan Webinar Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Video Conference di Kantor Dinas PKP Provsu (Jumat, 17/7).

Webinar Video conference dibuka oleh Agus Tripriyono mewakili Gubernur Sumatera, kemudian Sri Bagus Guritno selaku Direkrur pada Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun menyampaikan materi Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Yunan Novaris Vice President PT. Penjaminan Infrastuktur Indonesia (PT. PII).

Ida Mariana menyampaikan perkembangan mengenai KPBU Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei yang sudah melakukan sounding market. "selanjutnya menunggu kelanjutan tahapan dan arahan yang akan diberikan oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun setelah melakukan sounding market" ujarnya. KBPU Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei menjadi KPBU pertama yang sudah melakukan sounding market yang akan diikuti oleh Dispora KPBU Sport Center yang sudah melaksanakan FGD dan Dinas Perhubungan KPBU Sektor Transportasi di Provinsi Sumatera Utara.

Conference tersebut diikuti oleh Direktur Direktorat Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PT PII, Kepala Dinas PKP Provsu, Kepala Dinas Pemuda dan Olaraga Provsu, Dinas Perhubungan Provsu, Simpul KPBU, Bappeda Kab/Kota, Seluruh Universitas di Sumatera Utara dan Mahasiswa/i Sumatera Utara. Webinar tersebut dilaksanakan oleh Bappeda Sumatera Utara untuk mensosialisasikan Tata Cara Pelaksanaan Untuk Mensosialisasikan Tata Cara Pelaksanaan KPBU ke Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Utara. (ulfa)

45. DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN SOSIALISASI REMBUK WARGAKEGIATAN LANJUTAN PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI KELUARGA NASIONAL DALAM RANGKA BBGRM

July 20, 2020 Berita & Kegiatan

DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA KEGIATAN LANJUTAN PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI KELUARGA NASIONAL DALAM RANGKA PERENCANGAN BBGRM

Medan – Dinas PKP Provsu melalui Bidang Rumah Umum melakukan Sosialisasi dan Rembuk Warga Kegiatan Lanjutan Pilot Proyek Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Dalam Rangka Perencanaan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM), dilaksanakan di Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung (Senin, 20/07).

Hari Keluarga Nasional adalah untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan Negara, yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Dinas PKP Provsu melakukan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni di lokasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur. Sasaran kegiatan berlokasi di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung yang merupakan pemenang Kampung Keluarga Berencana terbaik Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di 6 tempat antara lain: Desa Paluh Manan Hamparan Perak – Deli Serdang, Desa Hasang – Kualuh Selatan Labura, Kelurahan Mencirim Binjai Timur, Desa Manggis – Serba Jadi Serdang Bedagai, Paindoan Rantau Parapat Labuhan Batu.

Kegiatan Sosialisasi dan Rembuk Warga merupakan forum pertemuan resmi yaitu pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan

sistem penganggaran, sasaran dan hasil program kegiatan, tata cara pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah penerima bantuan, teknis konstruksi rumah sederhana, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Teknis dari Dinas PKP Provsu, Tim Teknis Kota Medan, perangkat Kelurahan Bantan. Dalam pelaksanaannya warga tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sekarang dengan mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak selama kegiatan berlangsung. (ulfa)

46. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PROYEK RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI, SPORT CENTER DAN PROYEK LRT MEBIDANG DI PROVSU

July 21, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT POYEK RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI, SPORT CENTER DAN PROYEK LRT MEBIDANG DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Poyek Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei, Sport Center dan Proyek LRT Mebidang di Provinsi Sumatera Utara. Rapat melalui Video Conference di Medan (Selasa, 21/7).

Video Conference dibuka oleh Sri Bagus Guritno selaku Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, yang menyampaikan beberapa masukan dan perbaikan mengenai KPBU Rusunasa Terintegrasi KEK Sei Mangkei diantaranya meminta perbaikan lampiran mengenai sekup MBR dan penyesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan dilengkapi dengan affordable housing terkait relokasi penduduk mensupply kebutuhan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei. "proses PDF di Kemenkeu akan disupport supaya bisa lancar, permintaan PDF di Kemenkeu perlu direvisi karena tidak perlu DED dan itu dilampirkan pada saat meminta di

cantumkan di PPP Book, nanti akan difasilitasi Kemenkeu yang PDF nanti di Kemenkeu pembuatan FBC lanjutan market sounding kemudian pembuatan dokumen lelang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan" ujarnya.

Sri Bagus juga menjelaskan KPBU tidak memerlukan DED cukup basic desain, yang sudah ada Outline Business Case (OBC) nanti diperdalam lagi di Final Business Case (FBC) sambil dibuatkan dokumen lelang. DED akan dibuat oleh Badan Usaha Pelaksana.

Ida Mariana Harahap menyampaikan sudah menyerahkan surat pernyataan Gubsu terkait komitmen mengenai PJPK, surat permohonan dimasukan ke PPP Book dan surat ke Kemenkeu untuk dibantu PDF sewaktu mengirimkan berkas market sounding, "jadi tinggal melakukan perbaikan lingkup KPBU diubah menjadi tanpa MBR. perbaikan akan dikirimkan paling lama Senin 27/7" ujarnya.

Rapat ini diikuti oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Direktorat Keluarga, Anak dan Olaraga, Direktur Perumahan, Perkotaan dan Permukiman, Direktur Transportasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olaraga Provsu, Kepala Dinas Perhubungan Provsu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu dan Tim Simpul KPBU Provinsi Sumatera Utara. (ulfa)

47. PENGEMBANGAN KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMPROVSU

July 23, 2020 Berita & Kegiatan

PENGEMBANGAN KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMPROVSU

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap, M.SI memberi arahan dan membuka Rapat Koperasi di Aula Dinas PKP Provsu (Rabu, 22/07).

Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan "Kebutuhan akan rumah bagi ASN di lingkungan Pemprovsu masih sangat tinggi. Pemerintah pusat saat ini telah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai lembaga penyedia perumahan untuk ASN yang sebelumnya dilakukan oleh Bapertarum. Selanjutnya Ida Mariana mengharapkan agar koperasi nantinya dapat berperan sebagai penyedia perumahan seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat" ujarnya.

Sebagai narasumber Ungul Sitanggang selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provsu yang menyampaikan bahwa hampir di seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara belum memanfaatkan kegunaan koperasi, selama ini orientasi koperasi tersebut hanya diseputar kegiatan simpan pinjam sedangkan fungsi koperasi antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional,

"koperasi di Sumut dalam operasi data sistem (ods) saat ini jumlahnya 11.917 unit, yang di dalamnya termasuk binaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dimasa pandemic COVID-19 hanya 93 unit koperasi yang telah melaksanakan rapat tahunan secara virtual. Jumlah anggota Koperasi di Sumatera Utara yang data ods kurang lebih sekitar 900ribuan anggota dan dimungkinkan bisa lebih banyak jika pendataannya dilakukan secara lebih detail" ujarnya.

Rapat ini juga membahas untuk mengabungkan Koperasi dari Dinas Perkebunan Provsu, Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PKP Provsu, Dinas Bina Marga Bina Kontruksi Provsu, dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi satu Koperasi Sekunder. Diharapkan terciptanya koperasi sekunder dari beberapa OPD dapat meningkatkan kemampuan usaha koperasi untuk penyediaan perumahan bagi asn, non asn dan masyarakat yang belum memiliki rumah. (ulfa)

48. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK PEMBANGUNAN PUSAT OLARAGA TERPADU (SPORT CENTER) PROVSU

July 27, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK PEMBANGUNAN PUSAT OLARAGA TERPADU (SPORT CENTER) PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si mengikuti rapat Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen penyiapan Proyek Pembangunan Pusat Olaraga Terpadu (Sport Center) Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan dengan skema KPBU, melalui Video Conference di Medan (Senin, 27/7).

Rapat dibuka oleh Reghi Perdana mewakili Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun. menyampaikan "kami meminta informasi dan arahan pra fs ini, karena ini masih rapat awal kami ingin melakukan shopping list dalam rangka penyusunan Pra FS. Kami dibantu oleh tim konsultan" ujarnya. Dalam rapat Video Conference tersebut Ida Mariana memberikan masukan agar diberikan penjelasan lebih merinci lagi mana saja yang bisa menggunakan CSR, APBD Provinsi dan Reguler APBN" imbuhnya.

Ida Marina juga nemambahkan perkembangan mengenai Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei "saya sudah mengirimkan hasil diskusi kita yang lalu bersama pak bagus, yang diminta review kembali terkait dengan judul dengan kajian yang sudah kita sajikan pada studi pendahuluan maupun dengan DPP atau OBC adanya kata MBR, menurut UU 23 tahun 2014 memang MBR merupakan tugasnya pemerintah pusat, sehingga saya sudah melakukan revisi sudah saysa kirimkan ulang terhitung hari ini. Kami segera melakukan karena kami ingin melakukan percepatan-percepatan" tambahnya.

"Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei itu sudah tahap OBC mau ke tahap FBC yang semuanya dimohon didukung oleh Bappenas. Karena FBC nanti pada akhirnya sampe pada transaksi kami harapkan selesai pada Desember 2020. Terkait dukungan yang diberikan diluar KPBU itu ada penyediaan air baku untuk kawasan KEK Sei Mangkei itu juga termaksud pengolahan limbah dan pengolahan sampah sudah masuk tahap penyusunan studi oleh Pemprovsu yang sudah bekerjasama dengan balai prasarana permukiman wilayah yang ada di Sumatera Utara yaitu meminta standart yang harus disiapkan untuk mendukung DED yang sesuai standart keriteria yang diharapkan. Kami juga berkordinasi dengan pihak kabupaten simalungun semua usulan yang akan dialokasikan oleh anggaran APBN 2021 harus melalui kabupaten sehingga semua usulan yang berkaitan dengan KEK Sei mangkei akan melalui Kab. Simalungun" lanjutnya.

Rapat Video Conference ini diikuti oleh Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastuktur Olaraga, Kementerian Pemuda dan Olaraga, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olaraga, Direkrur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Direkrur Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Kadis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Kadis Dinas Pemuda dan Olaraga Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum Komite Olaraga Nasional Indonesia, Direktur Utama PT. Taram. (ulfa)

49. DINAS PKP PROVSU MENYELENGGARAKAN RAPAT VIDEO CONFERENCE DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PEROLEHAN RUMAH SUBSIDI BAGI PNS, CPNS DAN NON PNS DI PROVSU

July 29, 2020 Berita & Kegiatan

DINAS PKP PROVSU MENYELENGGARAKAN RAPAT VIDEO CONFERENCE DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PEROLEHAN RUMAH SUBSIDI BAGI PNS, CPNS DAN NON PNS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan – Dinas PKP Provsu menyelenggarakan Rapat Video Conference Dukungan Kebijakan dalam Perolehan Rumah Subsidi Bagi PNS, CPNS dan Non PNS di Provinsi Sumatera Utara, Ir. Ida Mariana Harahap, M,Si sebagai Kadis memoderator acara tersebut. Rapat dilakukan diq Kantor Dinas PKP Provsu (Rabu, 29/7).

Dalam pembukaannya Ida Mariana menyampaikan "bappertarum, yang sudah lama stagnant dan sudah digantikan dengan BP Tapera sehingga semua ingin mengetahui seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh Tapera terkait perolehan rumah subsidi bagi PNS khususnya di Sumatera Utara" ujarnya

"Saya juga sudah menyampaikan dokumen daftar PNS di Pemprovsu yang belum memiliki rumah sebanyak 1500 ASN yang belum memiliki rumah. Kami sudah memperoleh lahan sekitar 50-70 Ha untuk bisa nantinya dibantu oleh Tapera" tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Herry TZ selaku Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. "Penerbitan PP No. 25 Tahun 2020 sudah beroperasi untuk ASN di tahun ini bagi yang sudah mengikuti program bappertarum. Untuk 1500 ASN Pemprovsu jika disiapkan dengan baik bisa diselesaikan tahun 2020 jika datanya lengkap dan eligible untuk ASN MBR dengan pendapatannya kurang dari 8 juta dan memenuhi syarat mulai dari BI checking kita proses lebih awal sehingga bisa diketahui bisa memanfaatkan fasilitas rumah dengan tipe 36. Jika pendapatan diatas MBR maka Tapera sifatnya menabung dan tidak bisa menikmati fasilitas rumah subsidi dari program yang ada" katanya.

Dwi Nugroho perwakilan Komisioner BP Tapera menjelaskan "BP Tapera merupakan lembaga negara lanjutan dari BP Taperum PNS dimana fungsi dan peserta masih fokus kepada PNS, yang akan dimulai insyaAllah bulan oktober. Tapera merupakan program pembiayaan yang berasal dari tabungan peserta. Dasar pembentukan Tapera dari UU. No.4/2016 dan PP No.25/2020. Tujuan Tapera untuk seluruh masyarakat dan seluruh lapisan termaksud pekerja mandiri, namun sampai dengan 2021 realisasinya hanya bisa diterima oleh PNS karena untuk yang lain akan dibuat persyaratan tertentu, dan khusus untuk MBR" ujarnya.

Adang Sutara selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjelaskan "dalam rangka beroperasinya BP Tapera ada beberapa regulasi yang lagi pemerintah siapkan agar ASN bisa langsung menggunakan haknya. Pertama mengalihkan dana taperum sebanyak 11 T, akan segera diahlikan dari dulu yang namanya bapertarum menjadi dana Tapera. Dana ini terbagi menjadi 3 bagian pertama untuk para ASN yang sebagian itu akan menjadi saldo awal peserta untuk ASN aktif yang sudah mempunyai simpanan, maka langsung mempunyai hak memanfaatkan pembiayaan tersebut. Bagian lain adalah pensiunan yang aktif serta ahli waris pensiunan yang sudah meninggal" ujarnya.

"Ada dua mekanisme awal yang pertama mengalihkan dana Taperum untuk langsung dicatatkan sebagai peserta tapera untuk langsung mendapatkan haknya, kemudian ada sekitar 200ribu ASN yang belum mendapat haknya akan segera menerima haknya. Uang BP Tapera ada di portable Kementerian PUPR, Kemenkeu dan ada di kas negara yang akan dipetakan dan dialihkan ke BP Tapera dan akan diberikan kepada peserta yang sudah dari taperum. Tata cara yang pengalihan sudah di proses di Kemenkumham, tim liquidasi sudah dibentuk oleh Kementerian PUPR hari ini SK nya sedang difinalkan dan sebelum 2021 kebijakan itu keluar" tambah Adang.

Diskusi via Video Conference ini diikuti oleh OPD Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Ketua Komisi D Sumatera Utara, Bappeda Kota Medan, BKD Kota Medan, Kadis Perumahan, Permukiman Tata Ruang Kota Medan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Bappeda Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai, Bappeda Kab. Deli Serdang, BKD Kab. Deli Serdang, Dinas Perumahan, Permukiman Tata Ruang Kab. Deli Serdang, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Deli Serdang, Bappeda Kab. Karo, BKD Kab. Karo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karo, Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karo, Ketua APERSI Sumatera Utara, Ketua REI Sumatera Utara, Ketua APPINDO Sumatera Utara, Ketua KADIN Sumatera Utara.

50. KADIS PKP PROVSU BERSINERGI DENGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KEK SEI MANGKEI

August 4, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU BERSINERGI DENGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KEK SEI MANGKEI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. Ida Mariana M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Penyediaan Infrastuktur Jalan, air baku dan perumahan pekerja yang mendukung Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2020-2024 di Kantor Dinas PKP Provsu (Selasa, 4/8).

Sesuai dengan amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 bahwa salah satu upaya untuk percepatan penyebatan dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI dapat dilakukan melalui Perwilayahan Industri, dan salah satunya adalah melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan pengembangan kawasan industri. Komponen yang ada dalam suatu WPPI adalah Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri (KI), dan Sentara IKM. WPPI telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dimana terdapat 22 WPPI di seluruh NKRI.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pengembangan industri di luar pulau Jawa sesuai amanah Peraturan Pemerintah tentang RIPIN tersebut, kegiatan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) menjadi agenda penting dalam rangka pengembangan industry secara nasional. Program kegiatan pengembangan 22 WPPI dapat mengacu pada RIPIM 2015-2035, dimana salah satu programnya adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan antar daerah dalam pengembangan infrastruktur di dalam WPPI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 9 (sembilan) Kawasan Industri prioritas dan 18 (delapan belas) kawasan industry yang dikembangkan. Pengembangan 27 (dua puluh tujuh) kawasan industri tersebut harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjangnya, baik dari jumlah maupun kualitasnya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang menyebutkan bahwa infrastruktur industri wajib disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian perlu melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur khususnya jalan, air baku, dan perumahan pekerja dalam rangka pengembangan WPPI yang mendukung kawasan industri yang merupakan KI prioritas RPJMN 2020-2024 khususnya Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Industri Palu dan Kawasan Industri Batulicin. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam penyediaan infrastruktur jalan, air baku, dan perumahan pekerja yang mendukung kawasan industri dimaksud.

Rapat dibuka oleh Ignatius Warsito selaku Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian menjelaskan "Infrastuktur Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) ada infrastuktur dasar, jalan, penerangan jalan, drainase, IPAL dan IPAB dan sarana penunjang antara lain hotel, restoran, sarana olaraga, rumah ibadah, perbankan dan sarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan di Kawasan Industri" jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan oleh Ida Mariana "kami sedang mempersiapkan kawasan baru, berjarak kurang lebih 500m dari Kawasan Industri KEK Sei Mangkei, yang mana didalamnya terdapat rusunawa untuk para pekerja apartemen, hotel, sarana ibadah, pasar, sekolah dan semua yang dibutuhkan layaknya kawasan baru, nantinya akan diproses melalui KPBU dan sudah memasuki tahapan FBC" ujarnya.
"Semua infrastuktur yang kami harapkan untuk dicantumkan nantinya di BPIW, perencanaan sudah ada. Tahun ini juga dimulai pembangunan rusunawa para pekerja yang akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan sarana pendukung lainnya seperti jalan kawasan serta pembangunan air minum untuk distibusikan ke rusunawa" tambahnya.

Acara diikuti oleh Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Dinas PUPR dan Bappeda Provinsi serta Pengelola Kawasan Industri. (ulfa)

51. DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA KEGIATAN LANJUTAN PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI KELUARGA NASIONAL DI DESA PALUMANAN

August 7, 2020 Berita & Kegiatan • Bidang Rumah Umum

DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA KEGIATAN LANJUTAN PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI KELUARGA NASIONAL DI DESA PALUMANAN

Medan – Dinas PKP Provsu melalui Bidang Rumah Umum melakukan Sosialisasi dan Rembuk Warga Kegiatan Lanjutan Pilot Proyek Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Dalam Rangka Perencanaan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM), dilaksanakan di Desa Palumanan Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang (Rabu, 5/8).

Sosialisasi dan Rembuk Warga merupakan forum pertemuan resmi yaitu pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sistem penganggaran, sasaran dan hasil program kegiatan, tata cara pelaksanaan kegiatan, tugas dan tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah penerima bantuan, teknis konstruksi rumah sederhana, negosiasi panglong, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan.

Selanjutnya sosialisasi ini juga akan dilaksanakan di 4 tempat antara lain: Desa Hasang – Kualuh Selatan Labura, Kelurahan Mencirim Binjai Timur, Desa Manggis – Serba Jadi Serdang Bedagai, Paindoan Rantau Parapat Labuhan Batu.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Tim Teknis dari Dinas PKP Provsu, Tim Teknis Kab. Deli Serdang, perwakilan dari Babinsa dan perangkat Desa Palumanan. Dalam pelaksanaannya warga tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sekarang dengan mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak selama kegiatan berlangsung.

52. KADIS PKP PROVSU MENJADI NARASUMBER SEMINAR DARING PERENCANAAN RUMAH SUBSIDI YANG DIADAKAN OLEH PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR DAN DOKTOR ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN FAKULTAS TEKNIK USU

August 8, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENJADI NARASUMBER SEMINAR DARING PERENCANAAN RUMAH SUBSIDI YANG DIADAKAN OLEH PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR DAN DOKTOR ILMU ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi Narasumber di Seminar Daring Perencanaan Rumah Subsidi dengan Tema Perkembangan dan permasalahan pembangunan rumah subsidi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat, yang diadakan oleh Program Studi Magister Teknik Arsitektur dan Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (Sabtu, 8/8).

Seminar daring tersebut dibuka oleh Nurlisa Ginting selaku Kaprodi Magister Teknik Arsitektur dan Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Fakultas Teknik USU. Selanjutnya Ida Mariana memaparkan "Rumah Subsidi berasal dari program pemerintah Kementerian PUPR untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat Bepenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang nyaman dan dengan harga yang lebih terjangkau. Kebutuhan rumah berkaitan dengan backlog yang terjadi di Sumut bisa dikatagorikan menjadi backlog kepenghunian rumah dan backlog kepemilikan" jelasnya.

"Rumah subsidi diperuntukan oleh MBR dengan katagori pendapatan dibawah 5 juta. Konektivitas pembangunan rumah subsidi seperti program 1 juta rumah oleh Presiden Jokowi banyak yang salah tafsir, program ini adalah upaya pemerintah untuk mengurangi backlog. Pemerintah juga menyediakan skema pembiayaan perumahan subsidi melalui FLPP, SSB, BP2BT dan Tapera yang melalui Bank Daerah dan Bank Nasional" ujarnya.

"Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga menguraikan kewenangan dari dinas perumahan kawasan permukiman, ada 3 kewenangan yang pertama bagaimana menyelesaikan kawasan kumuh permukiman, memfasilitasi pembangunan PSU pada perumahan permukiman, merelokasi rumah bencana dan korban pembangunan pemerintah. pemerintah provinsi wajib memfasilitasi perumahan subsidi. Peran pemprov dalam pembangunan rumah subsidi dengan membangun fasilitasi pembangunan PSU permukiman seperti air minum, saluran drainase, sanitasi, sampah 3R, jalan lingkungan dan PJU " tambahnya.

Acara ini diikuti oleh Akademisi Studi Magister Teknik Arsitektur dan Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan Fakultas Teknik Universitas Sumatera, Mahasiswa dan Dinas PUPR Kabupaten/Kota.(ulfa)

53. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PERSIAPAN IID

August 14, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PERSIAPAN IID

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap M.Si mengikuti Rapat Persiapan Kegiatan Promosi Proyek Investasi *Indonesia Investment Day (IID)* yang akan dilaksanakan 25-26 Agustus 2020 secara virtual. Rapat Persiapan diadakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Jumat, 14/8).

Dalam rapat tersebut membahas teknis dan susunan acara yang akan dilakukan ketika *Indonesia Investment Day (IID)*, mematangkan bahan paparan yang akan disampaikan dan pendukung seperti narator dan speaker yang akan membantu dalam melakukan paparan. Ida Mariana menyampaikan usulan agar nantinya paparan disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk mengefesienkan waktu yang terbatas.

Salah satu paparan yang akan disampaikan pada *Indonesia Investment Day (IID)* mengenai Project Development Fund KPBU Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun yang diperuntukan untuk pekerja KEK Sei Mangkei, dan MBR disekitar KEK Sei Mangkei dan untuk pembangunan infrastruktur KEK Sei Mangkei karena sudah ada lebih kurang sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) pekerja yang mempunyai tempat tinggal cukup jauh menuju lokasi KEK sekitar 15 KM dengan resiko pekerja cukup tinggi baik keterlambatan, kelelahan dan rawan kecelakaan karena melintasi jalan jalan nasional dan untuk menyebar ekonomi secara lebih merata.

Rapat persiapan turut dihadiri oleh KBRI Singapura, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemuda dan Olaraga Provsu, Bappeda Provsu, dan Pengelola KEK Sei Mangkei.(ulfa)

54. DINAS PKP PROVSU BERSAMA DENGAN DINAS PKP KAB. TAPANULI SELATAN MELAKUKAN SOSIALISASI REMBUG WARGA II CPM DAN MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH T.A 2020

August 19, 2020 Berita & Kegiatan

DINAS PKP PROVSU BERSAMA DENGAN DINAS PKP KAB. TAPANULI SELATAN MELAKUKAN SOSIALISASI REMBUG WARGA II CPM DAN MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH TA. 2020

Basilam Baru, Tapanuli Selatan – Dinas PKP Provsu bersama dengan Dinas PKP Kab. Tapanul Selatan melakukan Sosialisasi Rembug Warga II CPM dan Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH TA. 2020, dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Basilam Baru Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan (Kamis, 19/8).

Adapun penerima manfaat di Kab. Tapanuli Selatan tahun 2020 sebanyak 50 kepala keluarga sedangkan untuk Desa Basilam Baru Kec. Batang Angkola sebanyak 14 KK. Penentuan penerima manfaat program RTLH dilakukan melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan validasi lapangan. Bantuan RTLH yang diberikan Pemprov sebanyak Rp 30 juta yang dibagi dua, yakni 26 juta untuk bahan material dan Rp 4 juta untuk tenaga kerjanya. Kalau ada kekurangan anggaran saat pengerjaan dibantu oleh swadaya masyarakat karena bantuan RTLH ini bersifat stimulan.

Acara Rambuk Warga II ini dilakukan secara langsung dan secara Video Conference yang dihadiri oleh Kadis PKP Tapanuli Selatan, Camat Batang Angkola dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tapsel dan diikuti melalui Video Conference oleh Hadasa Manurung dan PPTK RTLH.

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bantuan stimulan rutin setiap tahun dari Pemerintah Provinsi Sumatera utara untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program RTLH bukan sekedar untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Indonesia namun lebih dari itu, yakni demi menghasilkan generasi yang lebih baik, mengingat rumah merupakan inti dari sebuah keluarga.

Program bantuan RTLH Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas PKP Provsu sebanyak 300 penerima manfaat yang tersebar di Kab. Dairi, Kab. Batubara, Kota Pematang Siantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidimpuan dan Kab. Tapanuli Selatan.

55. KADIS PKP PROVSU PRESENTASIKAN PROYEK RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI PADA ACARA INDONESIA INVESTMENT DAY (IID) 2020 NORTH SUMATERA

August 25, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU PRESENTASIKAN PROYEK RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI PADA ACARA INDONESIA INVESTMENT DAY (IID) 2020 NORTH SUMATERA

Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap mengikuti kegiatan Indonesia Investment Day (IID) 2020 North Sumatera melalui konferensi video, Selasa (25/8/2020), dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Kesawan Medan. Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan peluncuran website North Sumatera Invest (NSI) sebagai bank data potensi Sumut (Selasa, 25/8).

Acara diawali dengan menyaksikan video sambutan Gubernur BI Pusat Perry Warjiyo dan Kepala BKPM Bahlil Lahadia, dilanjutkan dengan diskusi. Pada kesempatan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menawarkan tujuh proyek prioritas sebagai peluang investasi kepada para investor Singapura salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke yang dipresentasikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

"Kami sadar bahwa investasi adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Maka, kami senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut para calon investor, baik dari sisi ketersediaan data potensi investasi maupun regulasi kemudahan dan insentif, serta ketersediaan SDM sebagai tenaga kerja yang terampil dan profesional," ujar Edy.

Edy memandang positif pelaksanaan IID secara virtual sebagai salah satu upaya untuk bangkit di masa pandemi. "Jika tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan secara tatap muka, maka ini artinya pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk terus tumbuh. Terima kasih untuk seluruh pihak yang memungkinkan event ini terselenggara," pungkas Edy.

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya mengatakan bahwa IID merupakan program unggulan bersifat tahunan KBRI Singapura sejak tahun 2018. Tahun ini, IID dilaksanakan secara virtual melibatkan ratusan investor Singapura dan 11 provinsi di Indonesia Sumut, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan.

Kadis PKP Provsu Ida Mariana turut serta sebagai pembicara pada acara tersebut. Ida Mariana menambahkan "Rusunawa Terintegerasi KEK Sei Mangkei berjarak kurang lebih 500m dari Kawasan Industri KEK Sei Mangkei, yang mana didalamnya terdapat rusunawa untuk para pekerja apartemen, hotel, sarana ibadah, pasar, sekolah dan semua yang dibutuhkan layaknya kawasan baru, semua infrastuktur yang kami harapkan untuk dicantumkan nantinya di BPIW dan akan diproses melalui KPBU" tambahnya.

Adapun beberapa rangkaian acara IID 2020 North Sumatera adalah pengenalan beberapa proyek oleh penanggung jawab yakni Kaldera Toba oleh Kepala BPODT Arie Prasetyo, Rusunawa oleh Kepala Dinas PKP Sumut Ida Mariana, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat dan LRT Mebidang oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis.

Acara diakhiri dengan foto bersama dan peluncuran website NSI oleh Gubernur Sumut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Kepala Bappeda Sumut dan Kepala Dinas PM-PTSP Sumut.

56. KADIS PKP PROVSU SEBAGAI NARASUMBER PADA ACARA FGD PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DALAM MENDUKUNG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

August 27, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU SABAGAI NARASUMBER PADA ACARA FGD PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DALAM MENDUKUNG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi Narasumber di Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pengembangan Perumahan dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri, yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melalui Video Conference di Kantor Dinas PKP Provsu (Kamis, 27/8).

Pasca ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama di Sumatera Utara, yang difokuskan untuk jadi Pusat Pengembangan Industri Kelapa Sawit Hilir dan *Rubber City* Skala Besar dan Kualitas Internasional.

Ida Mariana menjabarkan "Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei sangat dibutuhkan karena sudah ada lebih kurang sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) pekerja yang mempunyai tempat tinggal cukup jauh menuju lokasi KEK sekitar 15 KM dengan resiko pekerja cukup tinggi baik keterlambatan, kelelahan dan rawan kecelakaan karena melintasi jalan jalan nasional dan ekonomi yang tidak menyebar secara merata dan pembangunan nantinya akan membuka lapangan kerja baru yang nantinya akan diutamakan masyarakat disekitar KEK Sei Mangkei" jelasnya.

"Rusunawa Terintegerasi KEK Sei Mangkei berjarak kurang lebih 500m dari Kawasan Industri KEK Sei Mangkei, yang mana didalamnya terdapat rusunawa untuk para pekerja, apartemen, hotel, sarana ibadah, pasar, sekolah dan semua yang dibutuhkan layaknya kawasan baru" tambahnya.

Acara Focus Group Discussion (FGD) diikuti oleh Kementerian PUPR, Direktur Pengelola KEK Sei Mangkei, Kepala Balai Pelaksana Penyedian Perumahan Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, Kepala Dinas PKP Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, Kepala Bappeda Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dan Ketua DPD REI Provinsi Sumut, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. (ulfa)

57. RAPAT PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 OLEH TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI REPUBLIK INDONESIA

August 31, 2020 Berita & Kegiatan

RAPAT PELAKSANAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 OLEH TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap mengikuti Rapat Pelaksanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia secara daring di Kantor Dinas PKP Provsu (Senin,31/8).

Pembukaan Rapat oleh Tim Evaluator Kemenpan RB Nadjamuddin Mointan. Dalam pembukaannya Nadjamuddin "berharap Pelaksanan Evaluasi Akuntabilitas memberikan dampak positif dan dapat dirasakan langsung ke masyarakat" ujarnya.

Rapat tersebut membahas mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, memperbaiki pohon kinerja, dan agar OPD dapat menyusun ulang Cascading Kinerja. Tim Evaluasi akan menunggu perbaikan sampai dengan bulan September. Menpan RB siap mendukung dan membimbing OPD Pemprovsu dalam menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Rapat diikuti juga oleh Sekertaris Daerah Provinsi sumatera Utara dan OPD Pemprovsu.(ulfa)

58. KADIS PKP PROVSU HADIRI RAPAT KERJA DPRD KOMISI D PROVSU

August 31, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU HADIRI RAPAT KERJA DPRD KOMISI D PROVSU

Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si memenuhi undangan Rapat Kerja DPRD Provsu didampingi Kabid, Kasi dan Kasubbag Dinas PKP. Rapat dilaksanakan di Komisi D lt.2 Gedung DPRD Jl. Imam Bonjol No.5 Medan (31/8).

Rapat dibuka oleh Ketua Komisi D H. Anwar Sani Tarigan, dalam rapat tersebut membahas Realisasi Anggaran Triwulan III T.A 2020, Program Rencana P. APBD T.A 2020, dan Program Rencana Anggaran APBD T.A 2021 yang dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas PKP Provsu.

Ida Mariana menjelaskan "urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014, target RPJMD juga mengalami pergeseran dengan adanya COVID-19. Kegiatan 2020 penambahan ruang kantor realiasasi 85%, pembangunan sarana air minum permukiman 2 paket sudah selesai, 2 sedang dilaksanakan dan 8 paket ditahap persiapan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan realisasi di Kota medan 64,27%, di Deli Serdang 35,71% dan di Langkat 68,85%, Pembangunan PSU Permukiman yang sedang proses lelang oleh UKPBJ Provsu, Rumah Relokasi Korban Bencana 80 unit dengan realisasi 64%, MBR 300 unit yang dibagi 50 unit di Batubara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan dan Pematang Siantar, dan Harganas 60 unit di lokasi Pemenang kampong KB Sumut 2019 ada di Medan, Binjai, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu. Rencana P 2020 ada Rehabilitasi RTLH, penyusunan masterplan, penyusunan DED, biaya sertifikasi tanah pemprovsu di Kab. Simalungun, penyusunan marterplan perumahan dan Penyusunan DED ASN pemrovsu. Renja 2021 sejumlah 37 usulan, yang dapat diakomodir adalah 30 usulan" jelasnya

Selanjutnya pada sesi diskusi anggota DPRD Komisi D menanggapi mengenai sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas PKP Provsu, menanggapi hal tersebut Ida Mariana menjelaskan bahwa "PAD Dinas PKP Provsu berasal dari pendapatan penyewaan mess milik Dinas PKP provsu yang ada di Parapat, yang saat ini realisasi 44,83%" jawabnya

Setelah melakukan diskusi rapat ditutup oleh Anwar Sani sebagai pimpinan rapat. (ulfa)

59. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. KARO

September 1, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KAB. KARO

Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi C DPRD Kab. Karo. Rombongan Komisi C ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C Firman Firdaus Sitepu. Pertemuan diadakan di Kantor Dinas PKP Provsu Jalan A.H Nasution Medan (1/9).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Ida Mariana Harahap M.Si dan Kepala Balai, Kasatker SNVT serta Kabid dan Kasubbag Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Wakil Ketua Komisi C DPRD Kab. Karo menyampaikan" ingin mengetahui dan meminta saran mengenai untuk pembangunan dan pembenahan lokasi Siosar yang dulunya merupakan hutan karena adanya erupsi gunung sinabung dan direlokasi sudah tahap pembangunan dan pembenahan, sekarang ini sudah dibenahi 3 desa yang sudah direlokasi perumahan nya tinggal jalan dan penataan lingkungannya yang masih dalam tahap pengerjaan. Gunung Sinabung sekarang lagi erupsi dan berdampak mulai dari lahar dingin dan hujan abu dan berdampak untuk perumahan disekililing dibawah Gunung Sinabung" ujar firman.

Senada dengan Wakil Ketua DPRD salah satu anggota DPRD juga menambahkan "tata ruang di Kab. Karo masih belum selesai pendataan nya, apakah nanti jika dilakukan pembangunan dan pembenahan tidak terjadi masalah jika tata ruang belum selesai, persyaratan apa saja yang bisa kami penuhi untuk membantu kawasan wisata Siosar" tambah lusi.

Ida Mariana menjelaskan "perlu ada keinginan dari OPD untuk ikut pembiayaan alternatif, mengenai pembangunan dan pembenahan untuk lokasi Wisata Siosar diperlukan pemenuhan persyaratan mulai dari lahan yang harus bersertifikat, revisi tata ruang sesegera mungkin dibutuhkan dengan persetujuan pusat hutan Siosar sudah dijadikan Area Penggunaan Lain (APL) termasuk perumahan itulah hasil revisi yang terbaru untuk segera diwujudkan dengan perda Kabupaten Karo" jelasnya.

Ida Mariana juga memberi tambahan "jika sudah mempunyai rencana bisa melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, atau jika OPD dan APBD nya tidak mencukupi bisa melakukan pembiayaan melalui KPBU seperti yang sedang Dinas PKP provsu lakukan saat ini untuk Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei. Pemilihan lokasi yang strategis, komponen bangunan yang dibutuhkan, packed wisata bunga yang bisa dikemas dari bunga segar, bunga kering, area pembibitan, area penelitian, homestay, dan macam macam tergantung peluang dan situasi kajian awal yang butuhkan, jika masih ada yang ingin ditanya nantinya bisa melakukan pertemuan selanjutnya atau melalui daring"tambahnya.

Acara ditutup dengan penyerahan kain ulos serta foto bersama.(ulfa)

60. KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT EKSPOSE PEMBAHASAN DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN UNTUK MENDUKUNG WISATA BAHARI

September 22, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT EKSPOSE PEMBAHASAN DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN UNTUK MENDUKUNG WISATA BAHARI

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap membuka rapat Ekspose Pembahasan Draft Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Permukiman Utara Medan untuk Mendukung Wisata Bahari melalui Video Conference via Zoom di Kantor Dinas PKP Provsu, Jl A.H Nasution No.20 (Selasa, 22/9).

Pada kesempatan tersebut Ida menyampaikan "Utara Medan berdampingan dengan Kabupaten Deli Serdang sehingga di dalam pembahasan kita sama-sama merangkai alur perjalanan wisata, bagaimana Utara Medan menjadi wisata utama untuk pantai timur khususnya dari kota Medan selain Danau Toba yang terkenal di Sumatera Utara. Rapat hari ini akan membahas beberapa masukan program yang kami harapkan bisa mengawal dapat dikolaborasikan melaui APBD Kab. Deli Serdang maupun Kota Medan serta menyamakan persepsi untuk bisa mewujudkan Utara Medan menjadi kawasan permukiman berbasis wisata bahari" ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, Tondi dari Dinas PKP Kota Medan memberikan saran "Pulau Sicanang untuk menunjang kawasan wisata mangrov sendiri, menurut saya kawasan tersebut kumuh karena adanya banjir rob dan perlu adanya penanganan banjir rob terlebih dahulu ditata berupa permukiman yang memiliki konsep wisata, sama seperti situs kota cina dan danau siombak kawasan ini memang permasalahan permukimannya banjir rob, harus dipikirkan siapa yang menangani banjir rob ini supaya kawasan ini tidak terlihat kumuh" jelasnya.

Tanggapan masukan, dan dukungan juga disampaikan oleh Camat Medan Belawan, Camat Percut Sei Tuan, Camat Medan Marelan, Camat Hamparan Perak, Pelindo I dan Operasional Pelabuhan Belawan mengenai Penataan Kawasan Permukiman Utara Medan untuk Mendukung Wisata Bahari.

Kelanjutan acara ini adalah diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait tercantum dalam pembangunan tanggul pengendali banjir rob, dan rencana pengembangan pelabuhan belawan yang berdampak pada warga yang bermukim di lahan Pelindo, sehingga tidak bisa memunculkan kawasan permukiman kumuh seperti yang terlihat sekarang ini.

61. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT KLARIFIKASI PERMOHONAN PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) PROYEK KPBU PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI SEMANGKE

October 1, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT KLARIFIKASI PERMOHONAN PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) PROYEK KPBU PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI

Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si mengikuti Rapat Klarifikasi Permohonan Project Development Facility (PDF) Proyek KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei melalui Video Conference via Zoom di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jl. Jendral Sudirman No.41 (Kamis, 01/10).

Rapat dibuka oleh Jimmy perwakilan Kementerian Keuangan, dalam pembukaannya Jimmy menyampaikan "Rencana pembangunan Rusunawa Sei Mangkei sudah mengajukan permohonan PDF kepada Kementerian Keuangan, kami sudah melakukan review atas dokumen yang disampaikan, kemudian dalam evaluasi ini ada arahan arahan terkait dengan concern dan terkait dengan eligibilitas PJPK itu yang coba di indentifikasi saat ini, dan seperti apa pemerintah Sumatera Utara mendukung proyek ini kebijakan-kebijakan yang sudah atau akan dikeluarkan untuk mendukung proyek ini dan perlu adanya sinergi dengan DPRD " katanya.

Selanjutnya Herry TZ – Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyampaikan "untuk memulai sesuatu memang selalu ada yang pertama, untuk Sumatera Utara mari kita sampaikan untuk coba hal pertamanya dengan mempercepat proses PDF nya dan bisa menjadi solusi untuk daerah lain" tambahnya.

Kemudian Agus Triprlyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan menjelaskan "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat berharap sekali PDF yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dapat segera direalisasikan sehingga project yang ada di Sumatera Utara khususnya proyek Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei dapat segera terlaksana" terangnya.

Ida Mariana kemudian menjelaskan "Merujuk dari UU No.23 tahun 2014 maka rusunawa terintegrasi KEK Sei Mangkei diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja pada KEK Sei Mangkei yang saat ini para karyawan nya bermukim lebih kurang 15-20 km dari KEK Sei Mangkei, sedangkan lokasi rusunawa mempunyai akses yang mudah dan dekat hanya berjarak 2km dari pintu gerbang KEK Sei Mangkei. Perusahaan yang ada di KEK Sei Mangkei juga sudah memutuskan tidak akan membuat perumahan bagi karyawan jadi mereka sangat mengharapkan untuk Rusunawa Terintegrasi ini segera dibangun agar para karyawan tidak perlu terlalu jauh untuk menempuh perjalanan yang jauh dengan resiko jalan lintas yang tinggi. PJPK juga sudah menyampaikan apa yang menjadi kewenangan provinsi dan tidak mengambil alih tugas pemerintah pusat. BLUD sedang diproses, kami sudah menyusun masterplan KEK Sei Mangkei, integrasi dengan saktor lainnya / Cross cutting program dan kami sudah membuat pembentukan Tim KPBU" jelas Ida Mariana.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan Serta Dinas PKP Provsu.

62. POKJA PKP SUMUT AKAN MELAKUKAN RESTRUKTURISASI POKJA SESUAI PERMEN PU NO. 12 TAHUN 2020

October 7, 2020 Berita & Kegiatan

Pokja PKP Sumut akan Melakukan Restukturisasi Pokja PKP sesuai Permen PU No.12 Tahun 2020

Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.SI didampingi oleh Kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara membuka acara Rapat Kerja POKJA PKP Sumatera Utara di Desa – Desa Resto Jl. Setia Budi No. 192 (Selasa, 06/10).

Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan "Pokja PKP Sumut akan melakukan restrukturisasi Pokja sesuai dengan Permen PU 12 tahun 2020 mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, peran masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah memalui Forum PKP dalam hal: pengendalian Penyelenggaraan PKP, pemeliharaan dan perbaikan PKP, pemanfaatan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP dan penyusunan rencana pembangunan PKP" jelasnya.

"Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pengabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP" tambah Ida.

Kemudian Agus Tripriyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan memberikan saran, agar segera disusun restukturisasi Pokja dengan mengundang Pokja-Pokja yang telah ada dan yang akan menduduki dijabatan Pokja PKP dan forum PKP adalah nama jabatan dari masing-masing organisasi. Hal ini sebagai antisipasi agar mutasi jabatan tidak menghalangi tugas-tugas di Pokja.

Pokja PKP adalah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pokja PKP Provinsi, Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pemanfaatan, juga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, Program nasional dan program Provinsi, memfasilitasi pembentukan dan penyelnggaraan forum PKP Kabupaten/Kota.

Rapat kerja ini diikuti oleh Dinas PKP Provsu, Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi Keuangan, BPN Provsu, Dinas SDA CK Provsu, BKKNB Provsu, BPS, Kepala Balai Penyediaan Perumahan, SNVT Penyedia Perumahan, Balai Pengembangan Permukiman Wilayah, PDAM Tirtanadi, DPD REI, APERSI, Bank Sumut, BTN Provsu dan PLN Wilayah Sumut.

63. KEPALA DINAS PKP PROVSU MENJADI NARASUMBER PADA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DUKUNGAN PERTANAHAN DAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI METROPOLITAN DAN KEK INDUSTRI

November 2, 2020 Berita & Kegiatan

KEPALA DINAS PKP PROVSU MENJADI NARASUMBER PADA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DUKUNGAN PERTANAHAN DAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI METROPOLITAN DAN KEK INDUSTRI

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Pertanahan dan Kelembagaan dalam Pengembangan Perumahan di Metropolitan dan KEK Industri yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diadakan di Hotel Harper Palembang, melalui Daring di Kantor Dinas PKP Provsu (Senin, 02/11).

Dalam paparannya Ida Mariana menyampaikan mengenai "Isu Strategis Perumahan yang terjadi di KEK Sei Mangkei adanya kebutuhan hunian bagi pekerja dan expatriate juga masyarakat di kawasan sekitar Sei Mangkei (Sibasa, Tebing Tinggi) juga lambatnya Pembangunan wilayah menyembabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembebasan lahan seluas 2,7 Ha dan direncanakan pembebasan lahan berikutnya seluas 50 (lima puluh) Ha dari lahan PTPN III Gunung Bayu pada tahun 2022 dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah (APBD) Provinsi Sumatera Utara" jelasnya.

"Kami Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap rencana proyek, baik dalam hal melengkapi infrastruktur pendukung pembangunan dan dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang sudah dialokasikan pada APBD 2019 s.d. APBD 2022 mendatang serta apabila diperlukan dukungan alokasi dana APBD dalam rangka memastikan rencana Proyek dapat berjalan" tambahnya.

Acara Focus Group Discussion (FGD) diikuti oleh Direkrorat Sistem dan Strategi Penyelenggara Perumahan, Direkrorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus, Direkrtorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Kepala Bappeda Provinsi terkait, PT. Perkebunan Nusantara III, Pengelola KEK Sei Mangkei Provsu, PT. Bintan Alumunia Indonesia Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Galang Bintang, Prov. Riau Kepulauan. (ulfa)

64. RAPAT KOORDINASI RENCANA PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN BERBASIS WISATA BAHARI

RAPAT KOORDINASI RENCANA PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN BERBASIS WISATA BAHARI

65. **Kadis PKP Provsu Menghadiri Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021**

November 24, 2020 Berita & Kegiatan

Kadis PKP Provsu Menghadiri Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021

Medan – Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap menghadiri rapat pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dengan Komisi – D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provsu dipimpin oleh Ketua Komisi – D, H. Anwar Sani Tarigan, selasa (24/11) di Ruang Rapat Komisi D, jalan Imam Bonjol Medan.

Dalam pemaparannya Ida Mariana menjelaskan bahwa rencana kegiatan APBD Dinas PKP Provsu total sebesar 58 milyar untuk Tahun 2021. Anggaran Tahun 2021 dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, relokasi korban bencana dan pembangunan PSU permukiman, jelasnya.

Terhadap pemaparan dari Dinas PKP Provsu, anggota DPRD Provsu memberikan tanggapan agar fokus pelaksanaan kegiatan didistribusikan secara merata ke seluruh Kab/Kota, terutama pada Kegiatan RTLH. Sehingga semua masyarakat di Sumatera Utara bisa memiliki rumah yang layak huni. DPRD Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana program ini langsung menyentuh kepada masyarakat. Terhadap tanggapan anggota DPRD Provsu, Ida Mariana menyampaikan bahwa dengan jumlah Kab/Kota yang begitu banyak di Sumatera Utara, menjadi dilema tersendiri untuk dapat mewujudkan apa yang di sampaikan oleh para anggota Dewan. Untuk pelaksanaan kegiatan dari mulai RTLH, penanganan PSU Permukiman dan kawasan kumuh, membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga untuk pendistribusian kegiatan akan dilakukan secara bertahap untuk tahun ini dan tahun selanjutnya, terang Ida.

Acara Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dihadiri juga oleh Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provsu, Dinas ESDM Provsu dan Dinas Perhubungan Provsu.

66. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MEMBUKA RAKOR KEGIATAN FASILITASI POKJA PKP PROVINSI SUMATERA UTARA

November 24, 2020 Berita & Kegiatan

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MEMBUKA RAKOR KEGIATAN FASILITASI POKJA PKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si

Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Ida Mariana Harahap membuka Rakor Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Santika Dyandra Medan pada 24 s.d 25 November 2020.

Dalam pembukaannya Ida Mariana menyampaikan "struktur Pokja dan Forum PKP sesuai dengan Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat, persiapan restrukturisasi dan pembentukan Pokja dan Forum PKP tahun 2020-2021, serta afirmasi penandatanganan komitmen bersama. Sekaligus mengindentifikasi keanggotaan Pokja dan Forum PKP Kab/Kota, kesepakatan lingkup bidang Pokja PKP, agenda Pokja 2020-2021 pendataan rumah berIMB dan non IMB, rumah yang tidak punya alamat dan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang belum bersertifikat, agenda tindaklanjut legalisai RP3KP dan penganggaran Pokja PKP dan Forum" jelasnya.

"Target dan hasil dokumentasi kesepakatan restrukturisasi Pokja PKP tahun 2020, draf struktur Pokja dan Foruk PKP Kab/Kota. Agenda Pokja 2020-2021, melanjutkan pembangunan basis data, tindaklanjut dokumentasi (legalisasi) RPSKP, serta mendorong urugensi isu perumahan dan kawasan permukiman di daerah" tambahnya

"Sangat banyak tantangan yang harus dihadapi, agar bagaimana kita menyahuti backlog tentang pembangunan rumah yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara yang semakin membutuhkan perumahan. Lahan kita tidak bertambah tapi masyarakat terus butuh terhadap hunian tempat tinggal, ini adalah tugas dan bidang kita bagaimana penyediaan akan perumahan" ujarnya.

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sumatera Utara Saiful Zuhri menjelaskan "kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan konsolidasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan PKP tahun 2020 terhadap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sesuai dengan amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan.

Peserta Rakor Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara

Narasumber lain nya dihadiri oleh Sekdaprovsu, Balai P2PSII, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Bappeda Provsu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut, Dinas PKP Provsu.

Diakhir acara diserahkan penghargaan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki respon tinggi terhadap Pendataan yang didahulukan melalui SNVT Penyediaan Perumahan Sumut, dan yang mendapat penghargaan adalah Kab. Batu Bara, Kab. Tebing Tinggi, Kab. Toba, Kab. Pak pak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara

67. KADIS DIWAKILKAN SEKRETARIS MEMBUKA RAPAT FGD KE II

December 15, 2020 Berita & Kegiatan

KADIS DIWAKILKAN SEKRETARIS MEMBUKA RAPAT FGD KE II

Medan – Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Tahap II yang bertemakan Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan sebagai rangkaian Kegiatan Evaluasi Paruh Waktu (Mid-Term Review) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2019-2023 yang diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (15/12).

Dalam kata sambutannya Anda Subrata menyampaikan "pada FGD terdahulu kita telah membahas tentang indentifikasi permasalahan dan faktor penghambat dalam upaya pencapaian program prioritas pembangunan Sumatera Utara, dalam FGD Tahap II akan menjaring informasi dan merumuskan strategi pencapaian indicator pembangunan dan indikator kinerja Gubernur Sumatera Utara terkait capaian pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur" ujarnya.

FGD menghasilkan beberapa poin antara lain akan dilakukan revisi kepada setiap OPD terkait, akan dilakukan revisi pencapaian target kinerja baik optimis/pesimis, akan dilakukan revisi nomenklatur dan perhitungan nya, target kinerja yang belum sesuai akan direvisi mengikuti IKU Gubernur Sumatera Utara, akan mempertahankan kinerja mendukung IKU walau tidak sesuai dengan pemendagri, IKU rasio Rumah Tidak Layak Huni sudah sesuai tetapi diganti karna wawenang pusat. Target kinerja OPD yang sudah sesuai tidak akan dilakukan perubahan, sedangkan yang belum sesuai perlu diusulkan dan dibahas lebih lanjut.

Turut menghadiri rapat FGD Tahap II, Bappeda Provsu, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provsu, Dinas Sumber Daya Air CKTR, Dinas Perhubungan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provsu, Dinas Lingkungan Hidup Provsu, Dinas Kehutanan Provsu. (ulfa)

68. ANDA SUBRATA MEMBUKA ACARA EVALUASI KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU

December 18, 2020 Berita & Kegiatan

ANDA SUBRATA MEMBUKA ACARA EVALUASI KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU

Medan – Sekretaris Dinas PKP Provsu Ir. Anda Subrata membuka acara Evaluasi Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Kurang Mampu pada tanggal 18-19 Desember 2020 di Hotel Swiss-Bellinn Jl. Gajah Mada No.49 (18/12).

Dalam Kata sambutannya Anda Subrata menyampaikan "pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dihadapkan pada berbagai tantangan seperti angka backlog yang masih tinggi, keberadaan kawasan kumuh di perkotaan, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah keberadaan rumah tidak layak huni, yang mencerminkan lemahnya kondisi sosial ekonomi" ujarnya.

"Karena itu Pemprovsu dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni dengan menyelenggarakan program pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Tahun 2020 program ini dilakukan di 7 Kabupaten/Kota dengan total rumah direhabilitasi sebanyak 400 unit" tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pelaksanaan dan hambatan yang terjadi di Kabupaten/Kota dalam melakukan program ini dari Kabupaten/Kota penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Penerima bantuan Rehabilitasi RTLH tahun 2020 ada 7 Kabupaten/Kota antara lain Kab. Dairi, Kab. Batubara, Kota Pematangsiantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Padangsidempuan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah dari awalnya 15 Kab/Kota dikarenakan penyusutan anggaran karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun-tahun mendatang. (ulfa)

12/IMG-8984.jpg